

**TATA KELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DI ERA PANDEMI
(STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNGSARI DAN
KELURAHAN SIMOMULYO)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial(S. Sos) dalam bidang
Ilmu Politik**



OLEH :

WIDINDA ARUM RAHMANINGTIAS

NIM : I01219035

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Widinda Arum Rahmaningtias
NIM : I01219035
Program Studi : Ilmu Politik
Yang Berjudul : Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi
(Studi Kasus Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 07 Juli 2023

Yang Menyatakan



Widinda Arum Rahmaningtias

NIM : I01219035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Widinda Arum Rahmaningtias

NIM : I01219035

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **“Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi (Studi Kasus Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing



Noor Rohman, M. A

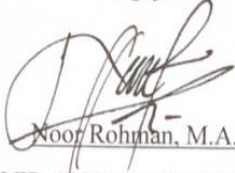
NIP
198510192015031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Widinda Arum Rahmaningtias dengan judul “TATA KELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DI ERA PANDEMI (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNGSARI DAN KELURAHAN SIMOMULYO)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Noor Rohman, M.A.

NIP. 19851019201503100

Penguji II



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 19690907199403200

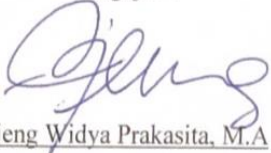
Penguji III



Masitah Effendi, M.Sosio

NIP. 19910517202012202

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Abd. Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Widinda Arum Rahmaningtias
NIM : 101219035
Fakultas/Jurusan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : widindaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

yang berjudul :

Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi (Studi Kasus Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo)
.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2023

Penulis

(Widinda Arum R)

ABSTRAK

Widinda Arum Rahmaningtias, 2023, *Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi (Studi Kasus Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo)*, “Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”

Kata kunci : Tata Kelola, Kebijakan Sosial, Pandemi

Penelitian ini adalah tentang Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi yang berada di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, lebih spesifiknya mendeskripsikan aspek bagaimana pengelolaan kebijakan sosial di masa pandemi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo. Bagaimana tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) pada era pandemi di kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo, Bagaimana pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo dalam perspektif perlindungan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, kajian dokumen dan menggunakan teknik Triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Analisis Perlindungan Sosial yang digagas oleh Armando Barrientos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan sosial di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo di era pandemi masih belum merata dan maksimal, dikarenakan banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan akan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Mengenai pendistribusian bantuan program keluarga harapan di era pandemi yang sering terlambat dikarenakan adanya pandemi yang mengharuskan untuk jaga jarak dan tidak adanya kerumunan, maka dilakukan dua/tiga bulan sekali. Dari hasil temuan tersebut peneliti berpendapat Kelurahan dengan aparatur sudah merespon dan berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh warga yang membutuhkan bisa mendapatkan, akan tetapi yang berhak memutuskan adalah daridinas sosial. dalam analisis perlindungan sosial menunjukkan bahwa respon dari dinas sosial sedikit terlambat dalam mengatasi permasalahan, khususnya warga yang sangat membutuhkan bantuan.

ABSTRACT

Widinda Arum Rahmaningtias, 2023, *Governance of Social Policy in the Pandemic Era (Case Study of Tanjungsari Village and Simomulyo Village)*, “Political Science Study Program Thesis, Faculty of Social and Political Sciences”

Keywords : Governance, Social Policy, Pandemic

. This research is about the Governance of Social Policy in the Pandemic Era in Tanjungsari Sub-District and Simomulyo Sub-District, more specifically describing aspects of how to manage social policies during a pandemic through the Family Hope Program (PKH) in Tanjungsari and Simomulyo Sub-Districts. How is the management of the Family Hope Program (PKH) in the pandemic era in Tanjungsari sub-district and Simomulyo sub-district, How is the distribution of the Family Hope Program that is right on target during a pandemic in Tanjungsari and Simomulyo sub-districts from a social protection perspective.

This research uses a descriptive qualitative method with a case study type of research. The data collection techniques used were observation, interviews, document review and using the triangulation technique as a check for data validity. The theory used in this study is the Social Protection Analysis theory initiated by Armando Barrientos.

The results of the study show that social policy governance in Tanjungsari Sub-District and Simomulyo Sub-District during the pandemic era was still uneven and optimal, because many people who should have received assistance did not receive this assistance. Regarding the distribution of assistance for the family of hope program in the pandemic era, which is often late due to a pandemic which requires people to keep their distance and there are no crowds, it is done every two/three months. From these findings, the researcher believes that the Kelurahan and its apparatus have responded and tried as much as possible so that all residents who need it can get it, but those who have the right to decide are from the social service. in the analysis of social protection shows that the response from the social service was a little late in addressing the problem, especially residents who really need help.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Konseptual..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| A. Pengantar..... | 15 |
| B. Penelitian Terdahulu | 15 |
| C. Kajian Pustaka | 25 |
| 1. Pentingnya Kebijakan Sosial di Era Pandemi | 25 |
| D. Kerangka Teori | 26 |
| 1. Konsep Perlindungan Sosial..... | 27 |
| 2. Konsep Kebijakan Sosial | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Pengantar..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 37 |
| E. Pemilihan Subjek Penelitian | 39 |
| 1. Informan Penelitian | 39 |
| 2. Teknik Penentuan Informan | 39 |
| 3. Objek Penelitian..... | 41 |
| D. Tahap-Tahap Penelitian..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Penentuan Masalah..... | 41 |
| 2. Penentuan Metode Penelitian..... | 42 |
| 3. Pengumpulan Data..... | 42 |
| 4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data | 42 |
| 5. Penyusunan Laporan Penelitian | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 1. Observasi..... | 43 |
| 2. Wawancara | 44 |
| 3. Kajian Dokumen..... | 44 |
| F. Teknik Analisis Data | 45 |
| G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data | 46 |
| BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA | 47 |
| A. Pengantar..... | 47 |
| B. Program Keluarga Harapan | 47 |
| C. PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo | 59 |
| D. Tata Kelola Program Keluarga Harapan / PKH pada Era Pandemi..... | 64 |
| E. Pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi | 69 |
| F. Aspek perbandingan Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo | 75 |
| G. Pasca pandemi | 79 |
| H. Penutup..... | 81 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |
| LAMPIRAN | 94 |
| 1. Surat Perizinan..... | 94 |
| 2. Pedoman Wawancara..... | 95 |
| 3. Jadwal Penelitian..... | 98 |
| 4. Dokumentasi Penelitian..... | 99 |
| 5. Sertifikat Cek Plagiasi Turnitin..... | 105 |
| 6. Biodata Peneliti..... | 106 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan Penelitian..... | 40 |
| Tabel 4. 1 Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan..... | 48 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini kajian tentang perlindungan sosial era pandemi. Penelitian ini membahas mengenai tata kelola kebijakan sosial di era pandemi yang sekaligus akan membandingkan bagaimana pendistribusian PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, apakah pada kedua daerah tersebut memiliki persamaan kelancaran pendistribusian PKH atau bahkan adanya keterlambatan pendistribusian PKH, juga akan membahas apakah ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi tidak mendapatkannya, peneliti akan mewawancarai beberapa penerima PKH di kedua wilayah tersebut dan akan membahasnya pada penelitian ini.

Pentingnya penelitian ini untuk membahas tata kelola dan membahas kebijakan sosial juga perlindungan sosial di era pandemi dalam satu kajian, mengapa begitu penting dilakukan penelitian ini, karena di sini sebagai peneliti saya akan membahas tentang penyebaran PKH. atau adanya hambatan penundaan penyaluran bantuan ini. Di kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, saya akan segera turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi ini kepada penerima manfaat PKH di kedua wilayah tersebut dan menjawab betapa pentingnya kebijakan pengelolaan PKH di era pandemi, sehingga peneliti ingin memfokuskan penelitian berjudul TATA KELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DI ERA PANDEMI.

Studi ini adalah penelitian tentang kebijakan sosial era pandemi ditingkat lokal. Lebih spesifiknya, kajian ini melihat implementasi program keluarga harapan (PKH) era pandemi, pengelolaan kebijakan sosial era pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo,

karena pada saat itu adanya Covid-19 menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia.¹ Yang menyebar pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang diakibatkan juga karena adanya penerapan pembatasan sosial pergerakan di berbagai daerah akibat pandemi Covid-19 bukan hanya di daerah saja yang terkena dampak hilangnya pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, diperlukannya kebijakan sosial dan perlindungan sosial yang pada saat itu merupakan elemen sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi adanya permasalahan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi. Perlindungan sosial mengacu pada proses kebijakan dan intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menanggapi masalah ekonomi, politik dan keamanan yang saat itu sedang dihadapi. Sebagai seperangkat kebijakan, perlindungan sosial mengacu pada apa yang pemerintah dapat mencapai, untuk memberikan perlindungan kepada warganya terutama orang miskin dan rentan. Kebijakan publik ini merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk dapat dibantu oleh pemerintah. Akan tetapi, perlindungan sosial bukanlah satu-satunya pendekatan dalam program pengentasan kemiskinan, adanya hasil yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan kombinasi dengan pendekatan lain, seperti penyediaan layanan sosial dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional.²

Perlindungan sosial yang ada di Indonesia terdiri dari tunjangan makanan, kesehatan dan juga tunjangan pendidikan yang sementara dan semi permanen seperti PKH untuk mempromosikan strategi komprehensif yang memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, yang sangat penting bahwa PKH tidak dilihat hanya sebagai program perlindungan sosial saja, akan tetapi sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang

¹ Hiroko Okada dan Takahiro Kiuchi, 2020, Predictors of Stay Home during COVID-19 Pandemic and Social Locking under Protection, hal 2-11

² Edi Suharto, PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN, Sosiohumaniora, Volume 17 No. 1 Maret 2015

pemerintah Indonesia. Untuk menciptakan sistem pendukung pendapatan yang menyeimbangkan perlindungan dan peluang untuk membantu kelompok miskin dan rentan menghadapi kondisi kemiskinan yang ada, juga untuk mencapai penghindaran jebakan kemiskinan, terutama melalui distribusi modal manusia dan penguatan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin.³

Adanya strategi perekonomian ketika pandemi COVID-19 sangat penting untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan. Dikarenakan pandemi pada tahun 2020 memberikan tekanan besar pada perekonomian, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sangat berdampak kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan finansial bagi banyak orang, situasi tersebut dapat mempengaruhi kemiskinan global yang terhitung sejak akhir tahun 2019, hampir seluruh negara di dunia tidak bisa terhindar dari bencana ini.⁴ Begitu banyak sektor ekonomi besar yang harus menanggung lebih banyak kerugian dan terpaksa gulung tikar karena adanya pandemi.

Pandemi Covid-19 juga telah memberikan efek antara lain pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, adanya penurunan pendapatan sektor pemerintah serta peningkatan biaya dan keuangan publik yang mengharuskan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional pada saat itu.⁵ Efeknya adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dan juga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Dan bertambahnya jumlah pengangguran dari sebagian masyarakat yang terkena PHK massal karena adanya pembatasan di berbagai industri, termasuk ekonomi. Berdasarkan hasil survei sosiodemografis, dampak Covid-19 paling besar berdampak pada

³ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2023)

⁴ “ Pandemi Covid-19 sebabkan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia akan melonjak untuk pertama kalinya sejak tahun 1998”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523>

⁵ C.S.T. Kansil dkk, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta. Jala Permata, 2009), halaman 50

pendapatan masyarakat miskin, masyarakat berisiko miskin, dan pekerja informal, karena ini sangat mempengaruhi daya beli pihak-pihak yang terlibat, yang berisiko melemahkan produktifitas.⁶

Adanya tingkat keparahan ancaman yang mengacu pada tingkat dan potensi bahaya perekonomian yang dirasakan masyarakat mencerminkan persepsi kerentanan seseorang dari bahaya, memahami kerentanan dan keseriusan ini dapat memotivasi individu untuk merespons adaptif.⁷ Kekhawatiran seseorang tentang kemiskinan dan ketimpangan semakin meningkat, sebagian diperkuat dan mengarah pada perubahan sosial yang lebih lanjut dalam pemikiran politik. Maka dari itu begitu perlunya pondasi ekonomi neoliberal untuk memperkenalkan kebijakan yang dapat menangani faktor struktural kemiskinan dan ketimpangan. Namun, perubahan ini tidak disertai dengan perubahan makro ekonomi dan kebijakan sosial. Sebaliknya, kebijakan sosial seringkali mengabaikan adanya hambatan kesenjangan yang struktural dan sistemik terkait dengan kemiskinan yang meluas. Alih-alih membangun sistem jaminan sosial yang universal dan komprehensif.⁸

Pemerintah meningkatkan dukungan PKH sebesar 25% selama wabah virus corona. Kebijakan ini mulai berlaku pada April 2020. Alokasi PKH dalam APBN 2020 sebesar Rp29,1 triliun dari pagu Rp1,7 triliun, sehingga diperlukan tambahan anggaran Rp8,3 triliun untuk alokasi PKH setelah ditambah Rp37 triliun. Total anggaran yang harus dibayarkan selama pandemi virus corona adalah 16 triliun rubel, atau 3,8 persen dari 37 triliun rubel.⁹ Kebijakan presiden adalah menjalankan kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan kepada presiden dalam Pasal (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Ahmad Nawawi, ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KE DEPAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, Vol. 2 No. 10, Oktober 2021, hal 1825

⁷ Georges Adunlin A. Christson A. Adedoyin, dkk, 2020, Using the protection motivation theory to examine the effects of fear arousal on the practice of social distancing during the COVID-19 outbreak in rural areas, hal 168-172

⁸ Shakra Razavi, Christina Behrendt, dkk, 2020, Reinvigorating the social contract and strengthening social cohesion: Social protection responses to COVID-19, Vol. 73, hal 55-80

⁹ Ibid, hal 137

Tahun 195. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 195) Republik Indonesia.¹⁰

Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan No. 13 Tahun 2011, dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Perintah Eksekutif No. 63 Tahun 2017 tentang pembagian perumahan. Nomor Referensi Menteri Dalam Negeri 32/2011 tentang pedoman penetapan beasiswa dan tunjangan penghasilan. Akibat pandemi Covid-19, PKH diberikan kepada masyarakat miskin untuk menjaga daya beli kebutuhan pokok. Mengingat keragaman karakteristik kelompok miskin dan rentan di Indonesia, pemerintah tidak dapat menggunakan satu mekanisme penargetan dan penyaluran PKH saja, karena bantuan PKH yang berupa sembako dan buah-buahan setiap bulan yaitu subsidi yang harus diberikan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di masa pandemi virus corona (Covid-19).¹¹

Penyaluran PKH pada saat itu berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang terhitung mulai April hingga Juni. Syaratnya, keluarga miskin yang bukan penerima BLT tidak mendapat kartu sembako dan kartu pra kerja, sedangkan penerima PKH tidak mendapat kartu bantuan BLT yang langsung mendapat Rp. 600.000 per bulan. Penerima BLT didasarkan pada data dukungan sosial terpadu (DTKS) dengan penyederhanaan dokumen dan percepatan penyaluran juga akan memudahkan penyaluran tunjangan desa.¹² Untuk menyelesaikan tugas penataan mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara, dan sebagainya, penyelenggaraan negara membutuhkan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri.¹³

¹⁰ ibid

¹¹ PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

¹² Mulyaili Sumarto, 2007, Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan, Volume 10, Nomor 3

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 15

Meskipun pemerintah membantu masyarakat miskin selama pandemi, masyarakat juga harus bisa membantu pemerintah dengan tidak meminta bantuan tersebut, seperti keegoisan masyarakat yang tidak memposisikan diri dengan masyarakat yang lebih membutuhkan dan yang mau mengerti. Dia bahkan menggunakan metode sistematis untuk memobilisasi orang lain untuk membujuk pemerintah agar mendistribusikan bantuan ke seluruh masyarakat, itu sebabnya orang ingin menerima dukungan negara terlepas dari situasi ekonomi mereka.¹⁴

Mengingat ruang lingkup dan kompleksitas masalah sosial, realitas masalah dan penyebabnya, tidak mengherankan jika orang mempertanyakan ruang lingkup kebijakan sosial. Apalagi jika ingin konsisten mengikuti pandangan bahwa kebijakan sosial adalah jawaban atas masalah sosial akan tetapi jika kebijakan sosial dimaknai sebagai respon negara dan akar permasalahannya terletak pada sistem dan struktur yang tidak adil, maka sangat diperlukan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang tidak adil dan tidak merata serta seringkali membutuhkan campur tangan negara. Seringkali ada bentuk intervensi pemerintah untuk mendobrak sekat-sekat struktural yang menjadi penyebab ketidakadilan itu.¹⁵

Banyak orang yang meneliti tentang PKH, banyak orang juga yang sudah meneliti tentang kebijakan sosial, akan tetapi studi kebijakan sosial di era pandemi yang kemudian melihat sisi politik tata kelolanya itu ternyata kurang mendapatkan perhatian, seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai pendampingan PKH saja dan tidak membahas lebih dari hanya sekedar pendampingan saja dan ada juga yang hanya membahas mengenai kebijakan sosial PKH saja tetapi tidak membahas tata kelolanya, maka dari itu peneliti meneliti tentang TATA KELOLA

¹⁴ <https://ppg.kemdikbud.go.id/news/peran-hubungan-masyarakat-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-instansi-pemerintah> (diakses pada tanggal 02 juli 2023)

¹⁵ Soetomo, Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 15, Nomor 1, Juli 2011)

KEBIJAKAN SOSIAL DI ERA PANDEMI belum ada yang membahas keduanya dalam satu penelitian.¹⁶

Mencermati gagasan global yang muncul dalam masyarakat global secara luas debat politik, kita dapat membedakan berbagai bidang kebijakan sosial dan hak dengan kebutuhan kelompok populasi atau kelompok sosial tertentu. Setiap orang yang memiliki kuasa atau pejabat publik memiliki keleluasaan untuk mengambil arahan strategis, seperti keputusan atau tindakan, untuk mengatasi masalah mendesak tertentu yang membutuhkan perhatian segera. Seperti kebijakan resmi pemerintah yang akan diterapkan jika memang diperlukan dalam bentuk pertimbangan yang dilindungi. Setiap pejabat yang bertindak atas nama jabatannya dan melayani kepentingan umum dilindungi undang-undang.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah: “Bagaimana tata kelola kebijakan sosial di masa pandemi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo?. Dari pertanyaan utama tersebut lebih spesifiknya, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan turunan sebagai :

1. Bagaimana tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) pada era pandemi di kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo ?
2. Bagaimana pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo ?

Tujuan rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah untuk mencari adanya permasalahan atau mungkin adanya perbandingan pembagian PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, bahwasannya peneliti

¹⁶ Harjono, dkk (2010), Analisis empirik tentang kerawanan sosial akibat keterbatasan sumberdaya sosial di Indonesia dipaparkan dengan cermat oleh beberapa peneliti yang kritis.

¹⁷ Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

meneliti apakah antara kedua kelurahan tersebut memiliki keterlambatan dalam pembagaian PKH, atau bahkan adanya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi, tidak mendapatkannya dan mereka tidak berani untuk menyuarakan pendapat atau protes ke RT bahkan ketua Kelurahan, juga peneliti bertanya kepada beberapa penerima PKH setempat bagaimana pembagian PKH dikala pandemi covid, dan bagaimana peran pendampingan RT setempat ketika adanya pencairan PKH.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana kebijakan sosial Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo diatur oleh Program Keluarga Harapan (PKH) di Masa Pandemi, dan untuk mengetahui dua pertanyaan turunan di atas yaitu :

1. Tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) pada era pandemi di kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo
2. Pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rencana pencapaian tujuan yang diteliti, memiliki berbagai manfaat diberbagai bidang teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Riset ini bisa menambahkan berbagai ilmu pengetahuan dalam keilmuan Ilmu Politik, dengan melibatkan peran pemerintahan Kota Surabaya untuk memberikan kebijakan dan solusi dalam menanggulangi dampak pandemi terhadap masyarakat menengah kebawah, serta bisa juga dipergunakan sebagai refrensi untuk kajian dalam bidang kebijakan publik, ekonomi politik dan pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Riset ini juga bisa dipergunakan sebagai sumber informasi dan evaluasi untuk pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi problematika-problematika yang mungkin akan datang kedepannya, serta masukan mengenai solusi dan kebijakan maupun tata kelola yang kurang efektif dalam implementasinya.

3. Manfaat Akademis

Dengan adanya riset ini semoga dapat memberikan motivasi tambahan kepada mahasiswa maupun masyarakat umum supaya dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan solusi dan kebijakan bagi masyarakat, serta dapat dijadikan refrensi bacaan bagi khalangan akademisi maupun khalayak umum sebagai tambahan wawasan akademisi dalam bidang ekonomi politik serta pemerintahan daerah.

E. Definisi Konseptual

Pada suatu penelitian dibutuhkan penjelasan konsep secara singkat dan jelas, untuk memberikan bentuk batasan istilah supaya tidak keluar dari fokus penelitian, maka konsep batasan istilah penelitian antara lain sebagai berikut :

A. Tata Kelola

Tata kelola tidak terlepas dari prinsip dasar organisasi yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utamanya. Istilah *good governance* memang belum baku, namun sudah banyak definisi yang mencoba membedah pengertian *good governance*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tata pemerintahan yang baik dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kemakmuran bangsa.¹⁸

¹⁸ Michael D Mehta, "Good Governance", dalam Mark Bevir, *Encyclopedia of Governance*, hal.359-262

Pengelolaan Informasi tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk papan manajemen informasi tingkat direktorat atau forum serupa, yang merumuskan dan memantau kebijakan dan tata cara penggunaan pengelolaan data teknis untuk seluruh organisasi. Tata kelola adalah penyelenggaraan manajemen dalam pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan tata kelola yang baik dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan juga tepat sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Sebagai bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, termasuk reformasi birokrasi. Diketahui bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan yang memberikan otonomi kepada setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat negara kesatuan republik Indonesia. Pasal 1 ayat 5 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.¹⁹

Konsep pemerintahan berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika zaman yang selalu berkembang. Membandingkan administrasi yang mengharuskan praktisi berpikir lebih banyak untuk lebih memahami konsep administrasi, meskipun setiap pendekatan memiliki implikasi positif dan negatif.²⁰ Berbagai konsep telah muncul dari berbagai kondisi

¹⁹<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19786/undangundang-nomor-32-tahun2004?r=0&q=UU%20no%2032%20tahun%202004&rs=1847&re=2020>

²⁰ Lesmana Rian Andhika, *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government*, Vol. 8, No. 2, hal 93

global seperti krisis ekonomi, kemiskinan, korupsi dan kapitalisme di negara maju untuk mengatasi hal tersebut. Bagi pemerintahan saat ini, konsep good governance bukanlah fenomena baru.²¹

B. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan keuangan untuk rumah tangga sangat miskin (RSTM), jika memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan. Peran PKH merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan lainnya. Kegiatan PKH dikoordinasikan oleh kelompok koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) baik di tingkat pusat maupun kabupaten. Oleh karena itu, kelompok pelaksana PKH segera membentuk TKPK untuk mencapai koordinasi dan sinergi yang baik.²² Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama untuk mengurangi kemiskinan masyarakat miskin dan meningkatkan sumber daya manusia, mempercepat pencapaian tujuan dan pembangunan masa depan. Tujuan ini terkait langsung dengan upaya percepatan pencapaian Millennium Development Goals (MDG).²³

C. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk memastikan jaminan pendapatan dan akses layanan sosial untuk semua, dengan perhatian khusus pada kelompok yang kurang beruntung, serta untuk melindungi dan

²¹ ibid

²² <https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengetahui Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco diakses tanggal 02 Januari 2023

²³ Sri Davi Anggraeni; Budi Setiawati; dkk, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA KUPANG NUNDING KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG, Volume 3 Nomor 2, 2020, hal 630

memberdayakan masyarakat di semua tahap kehidupan. Perlindungan sosial merupakan bagian penting dari strategi kebijakan publik untuk mengatasi kemiskinan, meringankan penderitaan kelompok lemah dan kurang beruntung. Beberapa studi menunjukkan bahwa setiap negara dapat memberikan perlindungan sosial dasar kepada masyarakat miskin, bahkan dinegara dengan aktivitas ekonomi yang relatif kecil.²⁴ Selain itu, keberadaan jaminan sosial dasar ini selalu memberikan dampak ekonomi positif yang jelas terhadap tujuan umum pembangunan nasional negara yang bersangkutan.

United Nations Children's Fund UNICEF mendefinisikan perlindungan sosial sebagai seperangkat kebijakan publik dan swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap ketidakberuntungan dan kemiskinan. Menghadapi ancaman nyata dari pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan yang komprehensif di bidang ini. Kementerian Keuangan juga mendistribusikan kembali 62,3 triliun rubel dana APBN. Memanfaatkan jaring pengaman sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu sembako atau bantuan sembako non-tunai.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini menjelaskan bab dan sub bab untuk memudahkan penulisan secara konsisten, mudah dipahami dan sistematis sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

²⁴ Habibullah, PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA, Vol. 3, No. 01, Sosio Informa, hal 2-4

²⁵ Nugrahana dan Hadi, Staretegi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, hal 790-791

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisikan latar belakang tentang tata kelola kebijakan sosial di era pandemi. Rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pencarian data/informasi dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat yang diberikan penelitian ini. Bagian ini adalah untuk memberikan gambar awal pada pembaca terkait topik yang akan dibahas.

BAB II TINJAU PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bagian ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yaitu tata kelola kebijakan sosial di era pandemi khususnya di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan sosial Armando Barrientos.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat secara urut dan rinci tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dan penelitian dilakukan selama 3 bulan, teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan dan terakhir pemeriksaan keabsahan data, data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisikan hasil dan analisis data dengan memaparkan hasil temuan. Pembahasan utama dalam bab ini adalah tata kelola kebijakan sosial di era pandemi juga mengenai pendistribusian, kemudian di analisis perlindungan sosial Armando Barrientos.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini adalah bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk semua pihak yang terkait dalam penelitian demi kemajuan di masa yang akan datang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengantar

Dalam bagian bab ini akan berisikan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada objek penelitian atau fokus penelitian atau sasaran yang dijabarkan dalam rumusan masalah dan hasil penelitiannya, dengan kajian pustaka mengenai kebijakan sosial di era pandemi dan kerangka teori konsep perlindungan sosial juga konsep kebijakan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Tata kelola kebijakan sosial yang baik di era pandemi menjadi sangat penting untuk memastikan, bahwa program-program bantuan sosial dan pemerintah dapat tepat sasaran serta efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, tata kelola kebijakan sosial juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, supaya tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat serta meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Melalui koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, monitoring dan evaluasi yang berkala, maka program-program bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar sehingga dampak negatif dari pandemi ini bisa diminimalisir secara maksimal.

Sebelum melakukan penelitian, kita perlu untuk membaca dan mempelajari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam menjelaskan tentang persamaan serta perbedaan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu perlu dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sekarang, tujuannya adalah untuk mengembangkan penelitian yang sebelumnya menjadi penelitian terbaru, dengan melihat letak fokus penelitiannya dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada objek penelitian atau fokus penelitian atau sasaran yang dijabarkan dalam rumusan masalah dan hasil penelitiannya. Dari berbagai macam penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki judul dan penelitian tentang Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo) sebagai acuan dan referensi adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian ini oleh Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty dengan judul “PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN”.²⁶ Artikel ini membahas kebergantungan pada perspektif dukungan pendapatan, dapat dipahami bahwa PKH sangat tidak cocok disebut sebagai program anti kemiskinan. Masyarakat miskin mengalami perubahan dan siap melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui model pemberdayaan, dikhawatirkan jika tidak didukung dengan cara lain, jumlah penerima manfaat program akan bertambah dan adanya ketergantungan terhadap dukungan masyarakat, baik yang menunjukkan kelemahan dalam pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

Kedua penelitian ini oleh Habibullah, dengan judul “*SOCIAL PROTECTION COMPREHENSIVE IN INDONESIA*”²⁷ Artikel ini membahas secara konseptual, jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga muncul banyak pendapat. Dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial menyeluruh adalah seperangkat upaya masyarakat untuk mengatasi risiko dan mengurangi kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat.

²⁶ Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

²⁷ Habibullah, SOCIAL PROTECTION COMPREHENSIVE IN INDONESIA, Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017

Ketiga penelitian ini oleh Muhammad Taufiq Hatta Wibowo, Ami Afriyani, dengan judul “STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG”²⁸ Artikel ini membahas tentang pandemi global COVID-19 memberikan pelajaran dan tentunya praktik langsung bagi masyarakat melalui tata kelola yang baik dan pedoman pengambilan keputusan yang disetujui pemerintah. Implementasi sebenarnya dari good governance adalah melalui produk hukum seperti UU PSBB. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat sangat penting dengan adanya sinergi yang ada.

Keempat penelitian ini oleh Armando Barrientos & David Hulme, dengan judul “*Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*”²⁹ Artikel ini mengkaji perkembangan pesat "revolusi tenang" di negara-negara berkembang kebangkitan perlindungan sosial. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, jaminan sosial telah menjadi salah satu dari tiga unsur utama strategi pembangunan nasional, pertumbuhan dan pembangunan manusia. Kerangka konseptual telah diperjelas dan diperluas, berfokus pada risiko, dengan fokus yang lebih luas pada kebutuhan dan peluang utama.

Kelima penelitian ini oleh Armando Barrientos & Claudio Santiba, dengan judul “*New Forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in Latin America*”.³⁰ Jurnal ini membahas tentang perubahan terkini dalam jaminan sosial di Amerika Latin, dan khususnya munculnya bentuk baru bantuan sosial. Sebagian besar literatur yang ada berfokus pada desain dan keefektifan, tetapi fokusnya di sini bukan pada menjawab pertanyaan yang lebih luas tentang pembangunan lembaga kesejahteraan sosial, kerangka kerja

²⁸ Muhammad Taufiq Hatta Wibowo dan Ami Afriyani, STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 12, Nomor 1, Januari 2021

²⁹ Armando Barrientos & David Hulme, Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution, Vol. 37, No. 4, Desember 2009

³⁰ Armando Barrientos & Claudio Santiba, New Forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in Latin America, volume 41, hal 1-26

konseptual yang mendukungnya, dan penerapannya dalam model pembangunan yang muncul.

Keenam penelitian ini oleh A.WAHDANIAH, dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE”.³¹Jurnal ini membahas tentang sumber daya memegang peranan yang sama pentingnya, karena ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program merupakan faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Struktur birokrasi adalah tentang prosedur atau pola yang mengatur pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lancar.

Ketujuh penelitian ini oleh Hamidou Taffa Abdoul-Azize1 & Rehab El Gamil2, dengan judul “*Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic*”.³² Studi ini mengkaji penerapan SPP untuk COVID-19 saat ini, terutama di negara-negara dengan penyakit yang paling parah. Dia menunjukkan bahwa jaminan sosial menjadi alat politik yang penting, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi, di mana biaya kuliah digunakan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, SPP merupakan alat yang fleksibel yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menilai ketahanan masyarakat terhadap berbagai gangguan di masa mendatang.

Kedelapan penelitian ini oleh Muhammad Rizki, dengan judul “DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI

³¹ A.WAHDANIAH, IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

³² Hamidou Taffa Abdoul-Azize1 & Rehab El Gamil2, 2020, Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic

KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19”.³³ Artikel ini membahas program pencegahan pandemi dilaksanakan dan memberikan dampak berupa peningkatan terkecil proporsi penduduk miskin selama pandemi. Namun, negara membutuhkan dukungan pendapatan yang lebih efektif, karena masih bagus untuk mengurangi konsumsi rumah tangga, dan rumah tangga swasta melakukannya dengan sangat buruk dalam situasi saat ini. Pemerintah dapat memperluas program asuransi sosial yang ada, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima bantuan pendapatan.

Kesembilan penelitian ini oleh Hartini Retnaningsih, dengan judul “*Social Protection in Efforts to Fulfill the Rights of Orphans Due to the Covid-19 Pandemic*”.³⁴ Jurnal ini membahas akibat pandemi Covid-19 menjadi masalah serius. Jauh dari tindakan manusiawi belaka, perlindungan sosial yang mendalam ini merupakan upaya untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang rentan terhadap kematian orang tuanya. Jaminan sosial harus dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif.

Kesepuluh penelitian ini oleh Delfi Heni Susanti, dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWO KANGKUNG DIMASA PANDEMI”.³⁵ Jurnal ini membahas terkait akses, dilaporkan berjalan menggunakan baik lantaran wilayah & desa pada kota madya gagal menaruh layanan kabar melalui wahana elektro misalnya email, WhatsApp & papan pengumuman pada aplikasi acara PKH. Terjadi keterlambatan pembayaran donasi acara PKH sebagai akibatnya mengakibatkan poly pertanyaan.

³³ Muhammad Rizki, DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19, Jurnal Good Governance Volume 17 No. 2, September 2021

³⁴ Hartini Retnaningsih, Social Protection in Efforts to Fulfill the Rights of Orphans Due to the Covid-19 Pandemic, Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 12, No. 2 Desember 2021

³⁵ Delfi Heni Susanti, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWO KANGKUNG DIMASA PANDEMI, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol. 1, No. 2 Juni 2022

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian Terdahulu | Hasil Temuan |
|----|--|--|
| 1. | Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. | Artikel ini membahas kebergantungan pada perspektif dukungan pendapatan, dapat dipahami bahwa PKH sangat tidak cocok disebut sebagai program anti kemiskinan. Masyarakat miskin mengalami perubahan dan siap melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui model pemberdayaan, dikhawatirkan jika tidak didukung dengan cara lain, jumlah penerima manfaat program akan bertambah dan adanya ketergantungan terhadap dukungan masyarakat, baik yang menunjukkan kelemahan dalam pemerintah yang dapat dimanfaatkan. |
| 2. | Habibullah, 2017, SOCIAL PROTECTION COMPREHENSIVE IN INDONESIA. | Artikel ini membahas secara konseptual, jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga muncul banyak pendapat. Dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial menyeluruh adalah seperangkat upaya masyarakat untuk mengatasi risiko dan mengurangi kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh |

| | | |
|----|---|---|
| | | pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat. |
| 3. | Muhammad Taufiq Hatta Wibowo, Ami Afriyani, 2021, STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG. | Artikel ini membahas tentang pandemi global COVID-19 memberikan pelajaran dan tentunya praktik langsung bagi masyarakat melalui tata kelola yang baik dan pedoman pengambilan keputusan yang disetujui pemerintah. Implementasi sebenarnya dari good governance adalah melalui produk hukum seperti UU PSBB. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat sangat penting, yang terpenting adalah sinergi yang ada. |
| 4. | Armando Barrientos & David Hulme, Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution | Artikel ini mengkaji perkembangan pesat "revolusi tenang" di negara-negara berkembang kebangkitan perlindungan sosial. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, jaminan sosial telah menjadi salah satu dari tiga unsur utama strategi pembangunan nasional, pertumbuhan dan pembangunan manusia. Kerangka konseptual telah diperjelas dan diperluas, berfokus pada risiko, dengan fokus yang lebih luas pada kebutuhan dan |

| | | |
|----|---|---|
| | | peluang utama. |
| 5. | Armando Barrientos & Claudio Santiba, New Forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in Latin America. | Jurnal ini membahas tentang perubahan terkini dalam jaminan sosial di Amerika Latin, dan khususnya munculnya bentuk baru bantuan sosial. Sebagian besar literatur yang ada berfokus pada desain dan keefektifan, tetapi fokusnya di sini bukan pada menjawab pertanyaan yang lebih luas tentang pembangunan lembaga kesejahteraan sosial, kerangka kerja konseptual yang mendukungnya, dan penerapannya dalam model pembangunan yang muncul. |
| 6. | A.WAHDANIAH, IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE. | Jurnal ini membahas tentang sumber daya memegang peranan yang sama pentingnya, karena ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program merupakan faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Struktur birokrasi adalah |

| | | |
|----|---|--|
| | | tentang prosedur atau pola yang mengatur pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lancar. |
| 7. | Hamidou Taffa Abdoul-Azize1 & Rehab El Gamil2, 2020, Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic. | Studi ini mengkaji penerapan SPP untuk COVID-19 saat ini, terutama di negara-negara dengan penyakit yang paling parah. Diunjukkan bahwa jaminan sosial menjadi alat politik yang penting, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi, di mana biaya kuliah digunakan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, SPP merupakan alat yang fleksibel yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menilai ketahanan masyarakat terhadap berbagai gangguan di masa mendatang. |
| 8. | Muhammad Rizki, 2021, DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19. | Artikel ini membahas program pencegahan pandemi dilaksanakan dan memberikan dampak berupa peningkatan terkecil proporsi penduduk miskin selama pandemi. Namun, negara membutuhkan dukungan pendapatan yang lebih efektif, karena masih bagus untuk mengurangi konsumsi rumah tangga, dan rumah tangga swasta melakukannya dengan sangat buruk dalam situasi saat ini. Pemerintah |

| | | |
|-----|--|--|
| | | dapat memperluas program asuransi sosial yang ada, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima bantuan pendapatan. |
| 9. | Hartini Retnaningsih, 2021, Social Protection in Efforts to Fulfill the Rights of Orphans Due to the Covid-19 Pandemic. | Jurnal ini membahas akibat pandemi Covid-19 menjadi masalah serius. Jauh dari tindakan manusiawi belaka, perlindungan sosial yang mendalam ini merupakan upaya untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang rentan terhadap kematian orang tuanya. Jaminan sosial harus dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif. |
| 10. | Delfi Heni Susanti, 2022, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWO KANGKUNG DIMASA PANDEMI | Jurnal ini membahas terkait akses, dilaporkan berjalan menggunakan baik lantaran wilayah & desa pada kota madya gagal menaruh layanan kabar melalui wahana elektro misalnya email, WhatsApp & papan pengumuman pada aplikasi acara PKH. Terjadi keterlambatan pembayaran donasi acara PKH sebagai akibatnya mengakibatkan poly pertanyaan. |

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil, bahwa banyak yang meneliti PKH akan tetapi tidak banyak yang meneliti tata kelola dan kebijakan

sosial menjadi satu. Dengan adanya tata kelola yang dirumuskan merupakan cara yang baik untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan sosial yang telah diambil.

Dalam penelitian yang telah dilakukan memiliki keunikan tersendiri dengan kasus yang berbeda-beda. Dari perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini mengambil dua yaitu tata kelola dan kebijakan sosial. Peneliti fokus terhadap tata kelola kebijakan sosial di era pandemi, mengkaji lebih dalam mengenai tata kelola dan kebijakan sosial.

C. Kajian Pustaka

1. Pentingnya Kebijakan Sosial di Era Pandemi

Beberapa kebijakan sosial yang dapat dilakukan oleh Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dalam rangka PKH di masa pandemi antara lain, adanya identifikasi dan pendaftaran penerima di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo yang bekerja sama dengan dinas sosial setempat untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan keluarga miskin, yang memenuhi kriteria penerima manfaat PKH. Hal ini dilakukan melalui survei dan pengumpulan data untuk menentukan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut. Kebijakan sosial dapat membantu orang beradaptasi dengan kebiasaan baru ini memberikan dukungan untuk pembelajaran virtual dan bentuk adaptasi digital lainnya.³⁶

Pendamping PKH akan bertugas untuk memberikan informasi, mendampingi proses administrasi, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Hal ini melibatkan koordinasi dengan kantor pos atau lembaga keuangan, yang ditunjuk untuk melakukan transfer atau pencairan dana bantuan kepada penerima PKH. Koordinasi dengan instansi terkait Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo bekerja sama dengan dinas sosial, kantor pos, bank, serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program PKH.

³⁶ <https://localisedgs-indonesia.org/asset/file/newsletter/publikasi/Research-4-WEB.pdf>

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁷

Dalam konteks pandemi, PKH memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Beberapa kebijakan sosial yang diatur oleh PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo selama masa pandemi antara lain adanya identifikasi dan verifikasi penerima di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo yang melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keluarga yang berhak menerima bantuan PKH. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa, bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti tingkat pendapatan yang rendah.

Pendampingan dan Monitoring selama pandemi, pendamping PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan pendampingan dan monitoring terhadap penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program bantuan dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pemutakhiran Data di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo secara berkala memutakhirkan data penerima PKH untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Sosial

Salah satu teori yang dikembangkan oleh Armando Barrientos adalah tentang perlindungan sosial di negara berkembang. Teorinya mengusulkan bahwa pemerintah harus memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan sosial mencakup program-program seperti bantuan sosial,

³⁷ Pak Isoni - LPMK

asuransi kesehatan, dan pensiun yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan dan melindungi orang-orang dari risiko kemiskinan.³⁸

Barrientos juga telah melakukan penelitian tentang dampak program-transfer tunai terhadap kemiskinan di berbagai negara, menyelidiki efektivitas program-program ini dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan keamanan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pekerjaan dan penelitian Armando Barrientos berkontribusi pada pemahaman kita tentang perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan di negara berkembang.

Armando Barrientos dan Claudio Santiba mengatakan bahwa, perlindungan sosial tindakan publik yang dilaksanakan sebagai respons terhadap tingkat kerentanan, risiko dan kekurangan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial dalam pemerintahan dan masyarakat tertentu, di mana fokus utamanya adalah menentukan dampak. Efektivitas dan fitur desain inovatif dari program ini atau sebaliknya, itu disambut baik, terutama karena pengetahuan tentang efektivitas program melawan kemiskinan tentunya harus dianggap sebagai barang publik global. Karakteristik umum ini menggambarkan parameter utama pendekatan baru untuk bantuan sosial yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan kerentanan.³⁹

Armando Barrientos dan David Hulme mengatakan bahwa konsep perlindungan sosial yang awalnya dominan sebagai manajemen risiko sosial diperluas dengan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dasar masyarakat. Praktik perlindungan sosial juga telah berubah dari fokus pada jaring pengaman sosial jangka pendek dan dana sosial menjadi gudang kebijakan dan program yang lebih luas yang mencakup inisiatif yang melindungi konsumsi rumah tangga termiskin dan termiskin serta memfasilitasi investasi pada manusia dan produksi.

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Modal lain, sebuah aset yang menawarkan jalan keluar dari kemiskinan yang terus menerus dan antar generasi serta memberdayakan kaum miskin untuk meningkatkan keterampilan mengatasi masalah mereka.⁴⁰

Kelanjutan energik dari revolusi diam-diam ini, baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan prospek masa depan orang-orang termiskin, untuk memperkuat solidaritas, keamanan nasional, internasional ini menetapkan dua batasan pengetahuan bagi peneliti dan pembuat kebijakan. Yang pertama adalah menemukan mekanisme untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial di negara berpenghasilan rendah tanpa mengubahnya menjadi bentuk pembangunan donor yang kemudian terpinggirkan. Lain dengan, yang sangat sedikit diketahui, mengidentifikasi pendekatan untuk memperluas perlindungan sosial ke negara juga wilayah di lingkungan yang rapuh dan kompleks. Berfokus pada program individu dengan demikian memberikan gambaran parsial tentang pertumbuhan perlindungan sosial di negara berkembang. Menurut Esping Anderson negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran aktif negara dalam administrasi dan organisasi ekonomi, yang mencakup kewajiban negara untuk memastikan akses ke tingkat layanan sosial dasar tertentu untuk warganya.⁴¹

Dalam model solidaritas negara, birokrasi merupakan mekanisme politik terpenting dalam implementasi sistem solidaritas sosial. Di negara-negara utara, sistem kesejahteraan sosial demokrasi berbasis negara adalah contoh nyata dari model masyarakat sosial yang kuat. Sistem kesejahteraan dikembangkan dalam kerangka universal, dalam komersialisasi besar hak-hak sosial dan persamaan warga negara. Sistem ini dikembangkan untuk mencari perlindungan hak-hak sipil secara universal dan karena itu, fungsi utama negara adalah untuk mendisiplinkan pasar yang tidak sempurna. Menurut Mulyadi Sumarto sebuah teori yang mengklaim bahwa negara

⁴⁰ ibid

⁴¹ Esra Dunder Aravacik, Social Policy and the Welfare State, *jurnal Public Economics and Finance*, hal 2-21

yang pemerintahannya menjamin kesejahteraan rakyat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, harus bertumpu pada lima pilar negara, yaitu demokrasi, penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*), keadilan sosial dan anti diskriminasi.⁴²

Tujuan dari program keamanan adalah untuk meringankan kesulitan sosial ekonomi bagi masyarakat miskin akibat krisis ekonomi Asia. Jaring pengaman merupakan program jaminan sosial pertama yang menyasar penduduk miskin Indonesia yang sebagian besar bekerja di sektor informal, karena sebelum adanya program Jaring pengaman, pemerintah Indonesia hanya menawarkan jaminan sosial kepada pekerja sektor publik. Dalam konteks Indonesia, perubahan sistem kesejahteraan kadang digambarkan oleh Mulyadi Sumarto dalam tipologi Esping Andersen merupakan kontribusi penting untuk mencoba memahami dinamika dan perubahan pembangunan kesejahteraan dari sistem dan kapitalisme maju dalam kaitannya dengan demokrasi dan ekonomiberkembang. Model ini berangkat dari asumsi dasar tentang negara atau lebih tepatnya negara bangsa, sebagai fokus pembangunan sosial dan tahapan kapitalisme sebagai penentu sifat sistem sosial. Mulyadi Sumarto juga menunjukkan bahwa banyak kebijakan sosial Indonesia dirancang untuk memberdayakan masyarakat daripada mengembangkan sistem sosial yang terlembagakan.⁴³

Perlindungan sosial merupakan bagian integral dari proses pembangunan Indonesia. Jaminan sosial di Indonesia telah berkembang sejak lama. Saat ini, pilar sistem jaminan sosial diperkuat dengan lahirnya sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial merupakan konsep luas yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah dan berbagai organisasi di seluruh dunia telah

⁴² ibid

⁴³ Raditria Wahyu Supriyanto, dkk, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, hal 14-80

mencoba memperluas perlindungan sosial ke negara-negara berkembang. Cakupan pendekatan kebijakan jaminan sosial mencakup pendapatan dasar, yang dapat berupa jaminan perlindungan sosial, seperti dana pensiun untuk orang lanjut usia, orang cacat, dukungan pendapatan, jaminan kerja dan layanan bagi para pengangguran dan orang miskin. mendefinisikan perlindungan sosial sebagai suatu sistem yang disediakan oleh kebijakan publik yang dirancang untuk meminimalkan dampak guncangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh penyakit, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat atau usia tua atau kematian.⁴⁴

Konsep perlindungan sosial secara tradisional terfokus pada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme yang melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana alam, pengangguran, bahkan kematian. Lemahnya fokus perlindungan sosial pada pengentasan kemiskinan jangka pendek sering dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung kekurangan anggaran dan dapat mencegah orang menjadi lebih mandiri. Karena dunia semakin memperhatikan untuk mendukung pembangunan yang lebih adil, jaminan sosial secara bertahap menjadi sistem yang lebih berfokus pada langkah-langkah preventif dan promosi jangka panjang.⁴⁵

Perlindungan sosial dapat dilihat secara keseluruhan, kebijakan dan program yang melindungi semua orang sepanjang hidupnya dari kemiskinan, kerentanan, pengucilan sosial dan dari kelompok yang kurang beruntung.⁴⁶ Pemandangannya lebih besar dari sebelumnya, artinya beban pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui subsidi, bantuan pendapatan dan sebagainya bertambah. Sedemikian rupa sehingga pemerintah Indonesia mengumumkan darurat kesehatan masyarakat yang diikuti dengan perlambatan ekonomi masyarakat. Kementerian Sosial

⁴⁴ ibid

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Silvia Masiero, 2020, COVID-19: What does it mean for digital social protection?

Republik Indonesia (Kemensos) mengumumkan akan mendukung PKH tahap kedua, demikian usulan sebelumnya, ketika target ditingkatkan dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta. KPM semula direncanakan kuartal keempat, diundur menjadi kuartal kedua untuk membantu 10 juta keluarga penerima manfaat di tengah dampak pandemi Covid-19.⁴⁷

2. Konsep Kebijakan Sosial

Pengertian kebijakan sosial adalah keputusan pemerintah menanggapi masalah publik yaitu, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi berbagai kebutuhan sosial. Singkatnya, kebijakan sosial mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah. ketika mereka bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan berbagai manfaat kesejahteraan, layanan masyarakat dan program dukungan. Kebijakan sosial adalah tindakan yang bertujuan untuk bersama-sama mencegah masalah sosial (pencegahan), menyelesaikan masalah sosial (tindakan perbaikan) dan memajukan kesejahteraan (tugas pembangunan) sebagai tugas negara dalam pelaksanaannya, hak-hak sosial warga negara.⁴⁸

Berbagai ahli mengungkapkan pemahamannya mengenai kebijakan publik seperti Dye yang mengemukakan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Wibawamengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

Menurut Iskandar bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-

⁴⁷ Winda Mediana dan Hasim As'ari, Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Volume 3. No. 2, Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 2021, hal 138-139

⁴⁸ Suharto dan Edi (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.

aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yang pertama adanya hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, kedua berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi dan ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.⁴⁹

Menurut Islamy terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, bahwa kebijakan publik itu pada dasarnya harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang pemahaman kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Kebijakan sosial memberi keputusan yang dibuat untuk memecahkan masalah sosial masyarakat, dengan mengadopsi definisi politik tertentu dan biaya sosial, meningkatkan modal, berbagi layanan dan mata pencaharian, strategi, kebijakan atau rencana untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial, bagian dari kebijakan

⁴⁹ Iskandar, Jusman. Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga

⁵⁰ Islamy, M. Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

publik. Kebijakan publik mencakup semua kebijakan pemerintah seperti ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan, keamanan (militer), institusi publik lainnya seperti air bersih dan listrik. Sedangkan masyarakat politik adalah jenis kebijakan publik yang berorientasi pada tujuan sosial, berkaitan dengan kesejahteraan, dengan kualitas hidup manusia secara luas dan sempit, yang terkait dengan beberapa layanan kolektif yang menjamin kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Mengkaji peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya dan isu-isu, bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program kesejahteraan lainnya. Kebijakan layanan mencakup perlindungan sosial untuk semua komunitas yang relevan. Dalam hal ini, masalah pekerjaan dan sosial menjadi harapan yang ditunggu-tunggu untuk kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.⁵²

Penelitian kebijakan sosial berkembang pesat dan kebijakan anti-kemiskinan diluncurkan selama masa jabatan kedua Joko Widodo. Salah satu bentuk jaminan sosial, memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada kehidupan ekonomi masyarakat, memaksa banyak usaha tutup karena tidak mampu memproduksi dan merumahkan ratusan ribu pekerja. Itulah sebabnya semakin banyak orang miskin yang meminta bantuan pemerintah untuk meringankan beban mereka. Studi ini menganalisis dan memaparkan kebijakan perlindungan sosial Indonesia, perlindungan sosial yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) selama pandemi Covid-

⁵¹ ibid

⁵² Hartini Retnaningsih, Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah, Volume 11, No. 2 Desember 2020

19, dampaknya dari perspektif ekonomi dan sosial. Sekarang bandingkan bahan pelajaran.⁵³

Menurut Esping Anderson negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran aktif negara dalam administrasi dan organisasi ekonomi, yang mencakup kewajiban negara untuk memastikan akses ke tingkat layanan sosial dasar tertentu untuk warganya. Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika memiliki empat pilar utama, yaitu kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, hubungan kerja modern, hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan massal modern.

Keempat pilar ini dimungkinkan dalam masyarakat sosial, karena negara memandang pelaksanaan kebijakan sosial sebagai pemberian hak sosial kepada warga negaranya. Hak-hak sosial ini dijamin sebagai hak milik, tidak dapat dicabut (tidak dapat disentuh), diberikan atas dasar kewarganegaraan dan bukan atas dasar kegiatan atau golongan.⁵⁴

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*). Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara tegas mengamankan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini di tengah pandemi covid-19.

⁵³ Baso Iping, PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL, Volume 1, Issue 2, hal 517-520

⁵⁴ Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 103-122

Dalam model solidaritas negara, birokrasi merupakan mekanisme politik terpenting dalam implementasi sistem solidaritas sosial. Di negara-negara utara, sistem kesejahteraan sosial demokrasi berbasis negara adalah contoh nyata dari model masyarakat sosial yang kuat. Sistem kesejahteraan dikembangkan dalam kerangka universal, dalam komersialisasi besar hak-hak sosial dan persamaan warga negara. Sistem ini dikembangkan untuk mencari perlindungan hak-hak sipil secara universal dan karena itu fungsi utama negara adalah untuk mendisiplinkan pasar yang tidak sempurna. Menurut pandangan liberal, negara hanyalah pemrakarsa pasar atau bahkan negara diatur oleh logika pasar. Negara dapat membuat berbagai kebijakan sosial, tetapi tujuan utamanya adalah menjaga kemampuan tembok individu untuk bersaing di pasar tenaga kerja.⁵⁵

Sasaran utama kebijakan sosial biasanya adalah orang miskin dan miskin, sedangkan mereka merupakan penyelenggara utama solidaritas sosial. Sasaran utama kebijakan sosial biasanya adalah orang miskin dan miskin, sedangkan pasar adalah penyelenggara utama solidaritas sosial. Sampai saat ini, penggunaan prinsip universalitas dalam sistem jaminan sosial cukup identik dengan sistem perlindungan sosial yang demokratis. Jenis universalitas ini mencakup komersialisasi hak-hak sosial, promosi kesetaraan menurut standar tertingginya dan kehadiran kekuatan sosial demokrat sebagai bagian terkuat dari reformasi sosial.⁵⁶

⁵⁵ Bambang istianto, *Demokratisasi Birokrasi* hal 17-26

⁵⁶ Wawan Mas'udi dan Cornelis Lay, *Politik Kesejahteraan Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia*, hal 7-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengantar

Dalam bagian bab ini berisikan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, membahas teknik triangulasi yang berisikan observasi, wawancara dan kajian dokumen, dengan lokasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo bersama beberapa informan yang sudah dipilih oleh peneliti, juga mengenai permasalahan ketika turun lapangan untuk langsung mewawancari narasumber.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian adalah ilmu tentang bagaimana penelitian dilakukan dengan benar.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang jelas. Penelitian ini mencari sumber informasi asli atau langsung dari saksi-saksi, yang memiliki gaya pengamatan langsung tentang orang-orang yang menghadapi masalah atau perbedaan. Hal ini sesuai dengan judul dan analisis konteks dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti menemukan hasil problematika yang sebenarnya dari hasil wawancara dan observasi langsung dari informan. Kajian ini menjelaskan kekhususan sosial dengan memaparkan berbagai faktor yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis.⁵⁸ Metode penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang digunakan dalam kerangka berpikir post-positivis, yang menelaah keadaan kehidupan sehari-hari, dimana para ahli merupakan instrumen kuncinya penilaian emosional dan abstrak menekankan pentingnya hipotesis.⁵⁹

⁵⁷ Almasdi Syahza., Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi, 2021

⁵⁸ Sanipah Faisal, Format-format Penelitian Sosial. Raja Grafindo: Jakarta 1995, Hlm 20.

⁵⁹ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Aldabeta: Bandung 2009, Hlm 8.

Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode Kualitatif Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif, baik tertulis maupun lisan, tentang subjek yang diteliti dan diamati. Pendekatan kualitatif menekankan pentingnya berpikir, dengan mengidentifikasi situasi tertentu (dalam konteks tertentu) yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir, sehingga urutan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan pengetahuan lapangan, dapat memberikan latar belakang penelitian yang lengkap untuk memecahkan masalah yang sebenarnya dan metode penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk menjawab survei ini, yang pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara. Peneliti mewawancarai unsur masyarakat atau unsur tokoh masyarakat atau unsur terkait lainnya, yang kedua adalah mengumpulkan data melalui observasi. Dalam penelitian ini daerah yang menjadi sasaran adalah Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Simomulyo, ketiga pengumpulan data melalui kajian dokumen. Memeriksa dokumen juga membantu menguji kebenaran informasi yang diterima. Kajian dokumen dapat dijadikan bukti bahwa para ilmuwan menyelesaikan proses merendam makanan tanpa keahlian sedikit pun.⁶⁰

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penentuan lokasi penelitian, merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menentukan lokasi penelitian maka tujuan dan sasaran penelitian ditentukan untuk memudahkan peneliti

⁶⁰ Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:Kencana, 2007), hal 69.

melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

2. Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono, tidak ada cara mudah untuk menentukan lama studi. Namun, lamanya penelitian bergantung pada ketersediaan sumber data dan tujuan penelitian. Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian berlangsung sekitar tiga bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2023. Penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo di Kota Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber informasi merupakan salah satu kunci terpenting dalam penelitian. Saat menggunakan informasi, sumber informasi yang tersedia belum tentu yang diinginkan. Oleh karena itu, analis harus dapat memilih sumber data mana yang mereka gunakan untuk penelitian mereka. Ada juga beberapa sumber informasi yang biasa digunakan dalam penelitian, khususnya sumber informasi penting dan adanya sumber informasi tambahan, seperti berikut.⁶¹

Pertama yaitu sumber data primer, biasanya bisa didapatkan dari subjek penelitian, seperti hasil dari wawancara dengan narasumber- narasumber secara langsung ataupun melalui media sosial dan sesuai dengan topik permasalahan. Kedua yaitu sumber data skunder, dapat diperoleh dengan cara tidak langsung, biasanya seperti dari buku, arsip, dokumen, jurnal, berita, artikel, studi literatur, serta sumber data lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan.

⁶¹ Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press 2011.

E. Pemilihan Subjek Penelitian

1. Informan Penelitian

Dalam memilih informan penelitian, analisis menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti mengumpulkan data dari sumber atau aset individu untuk alasan tertentu sesuai dengan penyelidikan kontekstual yang dilakukan oleh spesialis, dengan alasan bahwa sumber atau aset individu yang dipilih memiliki data dan informasi yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Sehingga informan atau narasumber, dapat memberikan informasi kredibel yang dibutuhkan oleh para ilmuwan sesuai dengan penyelidikan kontekstual yang sedang direnungkan dan juga dapat dikembangkan untuk memperoleh relevansi data.

Subjek pada riset ini yaitu Lurah Tanjungsari dan Simomulyo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, para penerima bantuan PKH yang berada di Kelurahan Sukomanunggal Kota Surabaya yang berada di wilayah Tanjungsari dan juga di Simomulyo, pendampingan PKH dari Kelurahan selain itu juga para rukun tetangga pada salah satu RT di Tanjungsari dan Simomulyo. Dengan memilih topik yang ditentukan oleh peneliti, maka peneliti yakin akan mampu menghasilkan suatu kajian ilmiah memiliki relevansi informatif dan kredibilitas informasi tentang masalah yang dijadikan bahan kajian tersebut.

2. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif adalah :

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.”⁶²

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan terlibat langsung atau yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Tata Kelola Kebijakan Sosial di era Pandemi (Studi Kasus Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo)

Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 16 informan, diantaranya yaitu Lurah, LPMK, Pendampingan PKH dan Masyarakat.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan Penelitian

| No. | Nama | Sebagai |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1. | Bapak Iwan | Lurah Simomulyo |
| 2. | Bapak Isoni | LPMK Simomulyo |
| 3. | Bapak Akbar | Pendamping PKH Simomulyo |
| 4. | Bapak Tofan | Ketua RT |
| 5. | Bapak Waluyo | Ketua RT |
| 6. | Bapak Feryadiwarso | Lurah Tanjungsari |
| 7. | Bapak UM ⁶³ | LPMK Tanjungsari |
| 8. | Bapak Febry | Pendamping PKH Tanjungsari |
| 8. | Bapak Sakir | Ketua RT |
| 10. | Ibu Sri | Ketua RT |
| 11. | Ibu Sumiati | Warga Penerima PKH |

⁶² Ibid

⁶³ Atas dasar kode etik

| | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| 12. | Ibu Parinten | Warga Penerima PKH |
| 13. | Ibu Istidamah | Warga Penerima PKH |
| 14. | Ibu Ngastriya | Warga Penerima PKH |
| 15. | Ibu Min | Warga Penerima PKH |
| 16. | Ibu Indah | Warga Penerima PKH |
| 17. | Ibu AN | Warga yang tidak menerima bantuan |
| 18. | Ibu JN | Warga yang menerima bantuan |

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Tata Kelola bantuan program keluarga harapan di era pandemi kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo
- 2) Kebijakan Sosial bantuan program keluarga harapan di era pandemi kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo
- 3) Pendistribusian bantuan program keluarga harapan di era pandemi kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Masalah

Sebelum penulisan dan kegiatan penelitian ini dimulai, peneliti menentukan masalah ataupun problematika yang akan diangkat untuk diteliti sebagai kajian data. Setelah tahap awal menentukan masalah untuk diselidiki, subyek yang didapati selaras dengan judul penelitian. Masalah utama menjadi jelas dalam batas-batas ruang lingkup setelah menganalisis subyek yang didapati.

Tinjauan literatur juga diperlukan untuk mencakup studi hasil penelitian yang sejenis dengan topik yang diteliti. Menggunakan penambahan data dari penelitian terdahulu dapat menambah kekayaan pengetahuan, bacaan, konsep, dan teori tentang topik masalah yang dikaji. Dengan menambahkan literatur penelitian terdahulu, peneliti juga dapat menambahkan temuan-temuan baru yang tidak ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

2. Penentuan Metode Penelitian

Setelah menentukan masalah sebagai topik penelitian, peneliti juga menentukan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan masalah yang diteliti. Pada tahap penentuan sistem eksplorasi, terdapat kepastian desain pemeriksaan, khususnya teknik, sumber, dan instrumen ragam informasi yang digunakan untuk mengamati sumber informasi dan paling penting adalah prosedur dalam penguraian informasi.⁶⁴

3. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan informasi. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan Lurah, pendampingan PKH, lembaga terkait RT, warga penerima, warga yang tidak mendapatkan bantuan, warga yang seharusnya tidak mendapat bantuan. Ada beberapa narasumber yang sulit untuk ditemui dan mempunyai banyak alasan maka harus menemui atau mendatangi beberapa kali untuk bisa wawancara, ada juga narasumber yang tidak memperbolehkan untuk di foto.

4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data

Setelah informasi terkumpul sesuai dengan kebutuhan ideal, tahap selanjutnya adalah pengolahan data atau file processing. Sewaktu mengolah data, termasuk manipulasi data, tujuannya

⁶⁴ Buku Metodologi Penelitian Kualitatif

memeriksa keseluruhan data yang telah diambil, untuk mengetahui keseluruhan kelengkapan data yang sudah terpenuhi ataupun data yang belum terpenuhi, serta cara melengkapi data dengan benar atau tidak. Dalam hal ini peneliti dapat memperbaiki data dengan cara mengoreksi data yang kurang lengkap untuk mengurangi kelengkapan data kembali.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Langkah terakhir adalah membuat laporan penelitian. Dalam laporan ini peneliti menceritakan apa yang diteliti, bagaimana penelitiannya dan apa hasil penelitiannya karena laporan penelitian mengandung 3 unsur, pertama adalah masalah diselidiki, kedua adalah metodologi digunakan, dan ketiga adalah hasil yang ditemukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan, dengan penelitiannya dan strategi pengumpulan data juga merupakan strategi untuk mendapatkan data yang tidak biasa, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, peneliti dapat menerapkan dan menggunakan, misalnya, metode pengumpulan data berikut ini:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengamati sesuatu fenomena berdasarkan pengetahuan atau gagasan untuk memperoleh informasi. Observasi dilakukan sebelum melakukan penelitian sebagai gambaran tentang sasaran peneliti dan pada penelitian ini, lokasi yang akan dituju nantinya adalah lokasi penelitian di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, kota Surabaya.

Peneliti melakukan observasi pada jawa pos dan suara surabaya akan tetapi tidak mendapatkan respon yang tidak sesuai selalu di janjikan bahwa akan dihubungi kembali tapi tidak ada, mereka terlalu menutup untuk bisa di wawancarai, juga dengan Lurah di salah satu Kelurahan setiap kali menemui selalu ada saja alasan dari pihak yang membantu, susah ditemui dan susah untuk diajak sekedar berbicara saja, kecuali adanya orang dalam maka langsung bisa bertemu.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode, dimana peneliti melakukan kegiatan tanya jawab dengan informan secara tatap muka secara langsung atau berkomunikasi secara nirkabel melalui telepon. Informasi yang diperoleh, dengan bertanya langsung kepada informan dianggap lebih akurat dan dapat diperhitungkan. Instrumen yang dapat digunakan seperti smarthphone, recorder, alat tulis dan alat pendukung lainnya. Menurut S. Nasution, wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi atau percakapan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data secara langsung atau melalui telepon.⁶⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, metode ini dilakukan mewawancarai lurah, lembaga terkait, pendamping PKH, rukun tetangga, warga penerima untuk menggali PKH di kelurahan itu seperti apa dan bagaimana, peneliti juga mewawancarai salah satu kepala rukun tetangga di salah satu Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo untuk mendapatkan beberapa info yang akan peneliti tanyakan dan juga beberapa keluarga penerima PKH.

3. Kajian Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, catatan, grafik, audio dan gambar. Gambaran umum

⁶⁵ S. Nasution. Metodologi research (penelitian ilmiah). Jakarta: Bumi Angkasa 2010, Hlm 113.

dokumen digunakan sebagai informasi pendukung bagi informan. Tinjauan dokumen, juga dapat membantu memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Telaah dokumen dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penyidik melakukan proses verifikasi tanpa perencanaan sedikitpun, sebagai bukti bahwa penyidik telah melakukan yang terbaik.⁶⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa telaah dokumen adalah teknik pendukung atau pelengkap, dimana kasus diawetkan dalam bentuk dokumen, gambar atau rekaman audio dan video audio. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data oleh peneliti dibandingkan dengan instrumen utama yaitu. smartphone dan instrumen sekunder.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis menerima data atau informasi kemudian menarik kesimpulan. Dalam artikel ini, analisis menggunakan hipotesis Miles, Huberman dan Saldana, memeriksa informasi menggunakan tiga tahap, untuk lebih spesifik, pengumpulan informasi (penumpukan dokumen), memperkenalkan informasi (pertunjukan kronologi), mencapai kesimpulan dan konfirmasi (penggambaran resolusi dan memeriksa). Penumpukan informasi menyinggung metode yang terlibat dengan memilih, memusatkan, merampingkan, mengabstraksi dan mengubah informasi (perubahan catatan).⁶⁷

Tahap pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan penelitian dengan menyederhanakan, mengesahkan dan mengubah data yang masih menggunakan bahasa yang kurang baik yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan secara langsung. Proses reduksi data akan berlangsung

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal 69.

⁶⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

selama penelitian berlangsung hingga mencapai tahap akhir penyusunan laporan akhir terpenuhi.

Tahap kedua menarik kesimpulan adalah bagian untuk melakukan verifikasi selama proses penelitian. Verifikasi dapat diuraikan secara singkat dalam melakukan penulisan, meninjau cacatan di lokasi dan bertukar pikiran dengan sesama rekan peneliti untuk mencoba memasukan salinan penemuan data ke dalam data lain. Kesimpulan akhirnya terjadi selama proses pengumpulan informasi, tetapi juga harus diperiksa sebelum informasi benar- benar dapat dimasukkan.

Tahap ketiga adalah informasi, sebagai kumpulan data yang terkoordinasi dan dapat mencapai penentuan dalam penelitian. Sebuah sajian informasi yang baik merupakan sebuah kunci dalam analisis kualitatif yang efektif, termasuk aneka macam matriks, grafik, jaringan, serta bagan. Keseluruhannya diatur untuk menyatukan informasi secara metodis dalam struktur yang rasional dan terbuka secara efektif. Dengan menggunakan teknik ini, pemeriksaan harus dapat dilihat dari apa yang terjadi dan memilih apakah akan membuat kesimpulan substansial atau melanjutkan penyelidikan yang didapat atas proses penyajian data.⁶⁸

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti menentukan keabsahan data, ketepatan antara fakta lapangan yang diteliti dengan informasi yang diterima dan disampaikan oleh peneliti. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian seperti ini.

⁶⁸ Metodologi Penelitian: Desain Komunikasi Visual

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengantar

Dalam bagian bab ini berisikan tentang pembahasan terkait Potret Program Keluarga Harapan Secara Umum, Program Keluarga Harapan di Era Pandemi, Dampak Pandemi Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, juga Pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo. Setelah pembahasan diatas berikutnya dilakukan analisis menggunakan teori dari Armando Barrientos. Analisis perlindungan sosial yang didasarkan pada prinsip universalisme menjamin hak-hak sosial bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

B. Program Keluarga Harapan

1. Potret Program Keluarga Harapan Secara Umum

Pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program berbasis bantuan sosial. PKH merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Indonesia. Melalui PKH, keluarga miskin mendapatkan bantuan dalam bentuk tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keluarga.

Selain PKH, pemerintah juga memiliki program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil. Program-program ini bertujuan untuk memberikan akses, keterampilan, dan dukungan kepada masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan, pemerintah perlu terus memperkuat dan mengembangkan program-program

tersebut. Upaya tersebut meliputi peningkatan alokasi anggaran, peningkatan efisiensi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Penting untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program PKH ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Sosial RI berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.⁶⁹

Tabel 4. 1 Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan

| Komponen Bantuan | Indeks Bantuan Per Tahun | Indeks Bantuan Per Tahap |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Kategori Ibu Hamil/ Nifas | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 |
| Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 |
| Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat | Rp. 900.000 | Rp. 225.000 |

⁶⁹ Khalid Zamri, Ria Ariani, “*EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kelurahan Koto Tengah Kota Payakumbuh)*”, Vol. 2 No. 1, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 2022 Hal. 343-353

| | | |
|--|---------------|-------------|
| Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat | Rp. 1.500.000 | Rp. 375.000 |
| Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat | Rp. 2.000.000 | Rp. 500.000 |
| Kategori Penyandang Disabilitas Berat | Rp. 2.400.000 | Rp. 600.000 |
| Kategori Lanjut Usia | Rp. 2.400.000 | Rp. 600.000 |

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial di Indonesia, yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan menyediakan bantuan tunai mensyaratkan rumah tangga yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Berikut adalah beberapa fitur utama dari program ini.⁷⁰

1. Kelayakan rumah tangga yang tergolong miskin dan memenuhi kriteria tertentu berhak mengikuti program ini. Kriteria tersebut antara lain memiliki ibu hamil atau menyusui, anak berusia 0-15 tahun dan anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
2. Transfer tunai program ini menyediakan transfer non-tunai ke rumah tangga yang memenuhi syarat secara teratur
3. Persyaratan bantuan tunai mensyaratkan rumah tangga memenuhi persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka

⁷⁰ <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

bersekolah secara teratur dan menerima pemeriksaan kesehatan secara teratur.⁷¹

4. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, di kalangan rumah tangga miskin.⁷²

PKH diluncurkan pada tahun 2007 dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Program ini ditujukan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin untuk mengakses layanan sosial dasar PKH, merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, dengan memberikan bantuan tunai secara berkala, serta memfasilitasi akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. PKH pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan seiring waktu. Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.⁷³

Dalam pelaksanaannya, PKH mengidentifikasi keluarga miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat dan memberikan bantuan tunai secara teratur. Selain itu, program ini juga mendorong keluarga penerima untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. PKH menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

⁷¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/program-keluarga-harapan>

⁷² <https://socialprotection.org/discover/publications/program-keluarga-harapan-pkh-indonesian-conditional-cash-transfer-programme>

⁷³ <https://www.liputan6.com/hot/read/5283424/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya>

kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini terus berlangsung dan mengalami evaluasi, serta penyesuaian dalam rangka memaksimalkan manfaat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu atau rentan. Dalam perkembangannya, PKH telah memberikan dampak positif bagi keluarga miskin, dengan memberikan bantuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperkuat akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup keluarga penerima.⁷⁴

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara program telah terpengaruh:

1. Peningkatan anggaran, menanggapi pandemi, pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran bantuan sosial PKH sebesar 25%.⁷⁵
2. Tantangan dalam Implementasi, pandemi telah menimbulkan tantangan dalam implementasi program, seperti kesulitan dalam memantau kepatuhan terhadap persyaratan dan memastikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.
3. Dampak terhadap penerima manfaat, pandemi juga berdampak pada penerima manfaat PKH, dengan beberapa mengalami kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan program.⁷⁶

Terlepas dari tantangan tersebut, program PKH tetap berjalan selama pandemi, dengan beberapa penyesuaian pelaksanaan.⁷⁷ Program tersebut tetap menjadi inisiatif perlindungan sosial yang penting di Indonesia,

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ <https://kemensos.go.id/en/distribution-of-pkh-until-the-end-of-may-hundreds-percent-achieved>

⁷⁶ <https://www.findevgateway.org/slide-deck/2021/03/impact-covid-19-pandemic-program-keluarga-harapan-pkh-beneficiaries-and-program>

⁷⁷ Muhammad Zaini, Asep Nurjaman, "The Implementation of the Family Hope Program (PKH) During the Pandemic in Batu City" hal 159-167

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan rumah tangga miskin. Penerapan PKH selama pandemi didasarkan pada kebijakan dan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan PKH dapat mencapai mereka yang membutuhkannya secara tepat dan efektif dalam mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Bantuan PKH di Tengah Pandemi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan miskin. Anggaran PKH naik menjadi Rp37,4 triliun dari sebelumnya Rp29,13 triliun.

Target penerimanya juga naik 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM. Saat terjadi pandemi COVID-19, PKH disalurkan tiap bulan sejak April 2020 dari yang biasanya triwulanan. Sejak Januari 2020, anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat COVID-19. PKH dialokasikan untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Lebih rinci, besaran PKH untuk ibu hamil adalah Rp3.750.000 pertahun, anak usia 0-6 tahun Rp3.750.000 pertahun, anak SD/ sederajat Rp1.125.000 pertahun, anak SMP/ sederajat Rp1.875.000/tahun, SMA/ sederajat Rp2.500.000 pertahun, disabilitas berat Rp3.000.000 pertahun, lansia usia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 pertahun.⁷⁸

2. Program Keluarga Harapan di Era Pandemi

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting selama era pandemi COVID-19. Di masa pandemi, PKH menjadi salah satu program bantuan sosial yang memainkan peran strategis dalam membantu keluarga miskin terdampak secara ekonomi akibat situasi krisis. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai PKH di era pandemi:

⁷⁸ <https://indonesiabaik.id/infografis/pkh-hadir-bantu-masyarakat-di-tengah-pandemi> diakses pada tanggal 06 juni 2023 pukul 22.24

1. Bantuan tunai PKH memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Bantuan ini menjadi lebih penting di masa pandemi karena banyak keluarga yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan mata pencaharian. Bantuan tunai tersebut dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan pelayanan kesehatan.
2. Penyesuaian penerima PKH melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima manfaat di era pandemi. Data dan informasi terkini digunakan untuk mengidentifikasi keluarga miskin yang baru terdampak akibat situasi krisis. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan lebih tepat sasaran.
3. Akses kesehatan selama pandemi, PKH juga memperhatikan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan. Program ini berupaya memastikan bahwa keluarga penerima mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang diperlukan, termasuk tes COVID-19, vaksinasi dan perawatan medis lainnya. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran virus juga menjadi fokus dalam pendampingan PKH.
4. Pendidikan jarak jauh dalam konteks pendidikan, PKH ikut berperan dalam mendukung akses pendidikan jarak jauh bagi anak-anak keluarga miskin selama masa pandemi. Program ini memberikan dukungan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak, seperti pembelian perangkat elektronik atau akses internet, sehingga mereka dapat mengikuti proses pendidikan dari rumah.
5. Pendampingan dan koordinasi PKH tetap melibatkan pendamping, petugas lapangan dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Koordinasi antara pemerintah

daerah, dinas sosial, kelurahan, dan instansi terkait juga menjadi penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat waktu.

PKH di era pandemi memiliki peran signifikan dalam membantu keluarga miskin menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh COVID-19. Program ini berupaya untuk memberikan perlindungan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara program ini bermanfaat. Peningkatan jumlah penerima manfaat, pada tahun 2020, PKH meningkatkan jumlah rumah tangga penerima manfaat dari 9,2 juta menjadi 10 juta untuk membantu wabah COVID-19.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin, terutama di masa pandemi COVID-19. Bantuan sosial PKH menjadi sangat penting saat banyak orang menghadapi kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang berkurang akibat dampak pandemi. Pemerintah Indonesia telah merespons keadaan ini dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial PKH sebesar 25% sebagai upaya untuk membantu lebih banyak rumah tangga yang membutuhkan. Langkah ini telah membantu memberikan dukungan dan perlindungan kepada lebih banyak keluarga yang terdampak.

Meskipun dihadapkan dengan tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi, implementasi PKH terus berlanjut. Program ini berusaha untuk terus beroperasi dan memberikan bantuan kepada rumah tangga yang memenuhi syarat. Dalam konteks pandemi, PKH memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan sosial kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Dengan adanya bantuan sosial PKH, diharapkan rumah tangga yang membutuhkan dapat menerima dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengentasan kemiskinan selama masa sulit ini.

Perlu diingat bahwa implementasi dan keberlanjutan PKH memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, pemantauan yang efektif, dan evaluasi yang berkala. Dengan tindakan yang tepat, PKH dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin di masa pandemi dan di masa mendatang.⁷⁹

3. Dampak Pandemi Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Beberapa dampak utama yang terjadi adalah penurunan pendapatan dan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tertentu. Pandemi ini menyebabkan penurunan pendapatan karena banyak sektor ekonomi mengalami penurunan aktivitas atau bahkan penutupan sementara sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan sektor informal seperti pedagang kecil dan pekerja harian adalah sektor-sektor yang terdampak secara serius.

Banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena berkurangnya permintaan dan kesulitan operasional perusahaan akibat pandemi. Hal ini menyebabkan tekanan finansial dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan bagi banyak masyarakat. Dalam menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak. Langkah-langkah tersebut meliputi program-program bantuan sosial seperti PKH, bantuan langsung tunai (BLT), subsidi gaji, dan program pemulihan ekonomi lainnya.

Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat daya beli, dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga berupaya untuk mendukung sektor-sektor terdampak, seperti sektor pariwisata, melalui stimulus dan insentif untuk mendorong pemulihan. Meskipun upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi ini. Penting

⁷⁹ Sri Endang Rahayu1, Ade Fitriani Harahap, "Analysis of the Impact of the Family Hope Program (PKH) Policy in the Era of the Covid-19 Pandemic in Silangkitang District Labuhan Batu Regency, North Sumatra Province", Vol. 1 Issue 1, hal 14-21

untuk terus meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, serta mengoptimalkan program-program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang ada. Melalui kerja sama dan upaya bersama, diharapkan masyarakat dan sektor ekonomi di Indonesia dapat pulih dan bangkit setelah pandemi COVID-19 berlalu.

Kenaikan pengangguran dikarenakan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kenaikan angka pengangguran di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengurangi tenaga kerja mereka sebagai akibat dari penurunan permintaan dan kegiatan ekonomi yang terbatas. Ini berdampak pada kesulitan mencari pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Penurunan daya beli, terbatasnya aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Banyak orang mengurangi pengeluaran mereka untuk hal-hal yang dianggap tidak penting atau mewah. Ini berdampak negatif pada sektor ritel dan industri lainnya.

Krisis ekonomi mikro dan makro karena dampak pandemi COVID-19 dirasakan tidak hanya pada tingkat individu atau rumah tangga, tetapi juga pada tingkat ekonomi mikro dan makro. Bisnis kecil dan menengah terutama rentan terhadap dampak ekonomi negatif, dengan banyak usaha kecil tutup secara permanen. Perekonomian secara keseluruhan juga terdampak dengan terjadinya kontraksi ekonomi dan penurunan pertumbuhan. Ketidaksetaraan dan kemiskinan dampak pandemi tidak merata, kelompok masyarakat yang sudah rentan seperti keluarga miskin, pekerja informal dan komunitas marginal menjadi lebih terpukul.⁸⁰

Ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk selama pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak orang terjerat dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam menghadapi dampak tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi beban ekonomi

⁸⁰ Rahmi Rosita, Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di INDONESIA, Volume 9 No 2, November 2020

masyarakat, memberikan bantuan sosial, dan mendorong pemulihan ekonomi. Program bantuan sosial seperti PKH memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Melalui program ini, pemerintah dapat membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang membutuhkan.

Selain bantuan sosial, upaya untuk memulihkan sektor ekonomi juga sangat penting. Pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi, memperluas program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pekerja, serta mendorong investasi dan konsumsi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan, dalam upaya pemulihan ekonomi. Kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi dan memperkuat upaya pemulihan ekonomi secara komprehensif.

Selain itu, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan, sehingga dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan bantuan dan memulihkan ekonomi. Dalam situasi yang menantang seperti itu, perlu adanya kebijakan yang holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memulihkan keberlanjutan ekonomi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.⁸¹

Dengan adanya pemberlakuan PPKM, masyarakat sangat berimbas terhadap perekonomian, seperti adanya PKH dan pedagang yang sangat memprihatinkan maka masyarakat terkena dampak pandemi, berimbas kepada perekonomiannya, akan tetapi adanya bantuan PKH yang diberikan kepada mereka maka dari itu, berikut pendapat masyarakat antara kedua Kelurahan yang mendapatkan bantuan PKH selama pandemi:

⁸¹ Ibid

“Bantuan program Keluarga Harapan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan selama pandemi, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan terdampak secara ekonomi.⁸²Bantuan program Keluarga Harapan juga sangat bermanfaat bagi lansia dan membantu memenuhi kebutuhan mereka.⁸³ Meskipun bantuan program Keluarga Harapan dianggap sangat membantu, ada pendapat bahwa bantuan tersebut kurang merata dalam penyalurannya.⁸⁴ Program Keluarga Harapan dianggap sangat membantu bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan, sehingga berdampak positif pada perekonomian masyarakat⁸⁵. Program Keluarga Harapan dianggap sangat membantu orang-orang yang masih memiliki banyak anak sekolah namun kehilangan pekerjaan.⁸⁶ Program Keluarga Harapan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan selama pandemi, terutama karena adanya pembatasan jarak dan kegiatan pencegahan COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan harian.”⁸⁷

Dari kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Keluarga Harapan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Meskipun beberapa pendapat menyoroti ketidakteraturan penyaluran bantuan, secara umum program ini dianggap membantu dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸² Ibu Sumiati – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 05 April 2023 pukul 16.31)

⁸³ Ibu Parinten – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 05 April 2023 pukul 16.50)

⁸⁴ Ibu Istidamah – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu 06 Mei 2023 pukul 19.02)

⁸⁵ Ibu Ngastriya – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 14 Mei 2023 pukul 16.04)

⁸⁶ Ibu Min Sugiarti – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 14 Mei 2023 pukul 16.18)

⁸⁷ Ibu Indah – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 14 Mei 2023 pukul 17.51)

C. PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo

1. Kebijakan Sosial Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo diatur oleh Program Keluarga Harapan PKH di Masa Pandemi

Kemensos telah menerapkan beberapa kebijakan terkait program PKH di masa pandemi. Pemerintah memperkuat program PKH untuk memberikan perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Program PKH ini disalurkan setiap bulan sejak April 2020, berbeda dengan penyaluran biasanya, anggaran program PKH meningkat menjadi Rp37,4 triliun dari sebelumnya Rp29,13 triliun, dan target penerima meningkat dari 9,2 juta menjadi 10 juta.⁸⁸

Program PKH memiliki manfaat yang diperluas hingga mencakup penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini sesuai dengan konstitusi dan program Nawacita Presiden yang mendorong inklusi sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaksanakan beberapa kebijakan terkait program PKH di masa pandemi untuk memperkuat program dan meningkatkan manfaatnya. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan anggaran yang diperuntukkan bagi program PKH. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan program serta meningkatkan jumlah dan nilai bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima.

Selain itu, perluasan manfaat bagi penyandang disabilitas dan lansia merupakan langkah penting dalam menjaga inklusi dan kesetaraan sosial. Dengan memasukkan kelompok ini dalam program PKH, diharapkan mereka dapat memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Kemensos, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program PKH yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah lambatnya proses distribusi bantuan yang dapat mengakibatkan keterlambatan bagi keluarga penerima. Keterbatasan koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

⁸⁸ <https://sosial.ntbprov.go.id/penyaluran-pkh-hingga-akhir-mei-telah-100/> (diakses pada tanggal 02 juli 2023)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara semua pihak terkait, seperti dinas sosial, kelurahan, RT/RW, dan lembaga keuangan atau pos yang terlibat dalam pendistribusian. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Dengan melakukan perbaikan yang diperlukan, diharapkan program PKH dapat menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada keluarga penerima, termasuk penyandang disabilitas dan lansia..⁸⁹

Sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH), kebijakan sosial di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo pada masa pandemi diatur untuk memberikan bantuan juga dukungan kepadakeluarga miskin dan rentan. Beberapa kebijakan sosial yang dapat dilakukan oleh Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dalam rangka PKH di masa pandemi adanya identifikasi dan pendaftaran penerima di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo bekerjasama dengan dinas sosial setempat untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan keluarga miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat PKH. Hal ini dilakukan melalui survei dan pengumpulan data untuk menentukan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Pendampingan dan monitoring setelah keluarga miskin terdaftar sebagai penerima PKH, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo memberikan pendampingan dan monitoring kepada mereka. Pendamping PKH akan bertugas untuk memberikan informasi, mendampingi proses administrasi, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Penyaluran bantuan di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo berperan dalam melakukan penyaluran bantuan PKH kepada keluarga penerima. Hal ini melibatkan koordinasi dengan kantor pos atau lembaga keuangan yang

⁸⁹ Ibid, Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

ditunjuk untuk melakukan transfer atau pencairan dana bantuan kepada penerima PKH.⁹⁰

Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo sangatlah diakui. Melalui kerjasama antara dinas sosial, kantor pos, bank, dan pihak terkait lainnya, proses penyaluran bantuan PKH dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Penyediaan data yang akurat, dengan bekerja sama dengan dinas sosial, bank, dan kantor pos, kelurahan dapat memperoleh data yang diperlukan untuk proses identifikasi dan seleksi penerima PKH. Hal ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan kepada keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
2. Penguatan mekanisme penyaluran bantuan, dengan melibatkan kantor pos dan bank, penyaluran bantuan PKH dapat dilakukan dengan mekanisme yang efisien dan aman, seperti transfer tunai langsung ke rekening penerima. Hal ini membantu meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian.
3. Saling mendukung dalam pelaksanaan, melalui koordinasi yang baik, instansi terkait dapat saling mendukung dalam pelaksanaan program PKH. Misalnya, dinas sosial dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada penerima bantuan, sementara kantor pos atau bank dapat memberikan layanan perbankan yang memadai.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, koordinasi dengan instansi terkait membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program PKH. Dengan adanya kerjasama yang baik, proses penyaluran bantuan dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara efektif.

⁹⁰ <https://dinsos.palangkaraya.go.id/istilah-singkatan-yang-lazim-digunakan-dalam-penyelenggaraan-tugas-sosial/> (diakses pada tanggal 02 juli 2023)

Penting untuk terus memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan program PKH dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Edukasi dan informasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo juga berperan dalam memberikan edukasi juga informasi kepada keluarga penerima PKH mengenai pentingnya memanfaatkan bantuan dengan bijak, hak dan kewajiban sebagai penerima, serta layanan dan program lain yang tersedia bagi mereka. Melalui kebijakan sosial yang diatur oleh PKH, diharapkan masyarakat di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta mendapatkan dukungan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan kebijakan sosial oleh kelurahan tanjungsari terhadap PKH ketika pandemi, terlepas dari penjelasan singkat diatas adapun pernyataan dari lembaga masyarakat dan aparatur desa sebagai berikut. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa individu yang disebutkan, terdapat beberapa poin yang dapat diidentifikasi:

“Pendaftaran dan verifikasi adanya pendekatan pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan PKH dilakukan melalui usulan mandiri dari masyarakat, dengan melibatkan RT, RW, atau LPMK. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan kriteria seperti tingkat pendapatan rendah, terdampak PHK, atau memiliki anak sekolah.⁹¹ Penyaluran bantuan PKH dilakukan secara terjadwal dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kantor pos atau lembaga keuangan.⁹² Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat waktu kepada penerima yang memenuhi kriteria⁹³. Pendampingan dan monitoring terdapat

⁹¹ Pak Feriyadiwarso – Lurah Tanjungsari (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 17 Mei 2023 pukul 15.11)

⁹² Pak UM (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.11)

⁹³ Pak Febry – Pendamping PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 17 Mei 2023 pukul 14.32)

pendampingan dan monitoring yang dilakukan kepada penerima bantuan PKH⁹⁴. Tujuannya adalah memberikan informasi, bimbingan, serta memastikan bantuan dimanfaatkan dengan baik sesuai⁹⁵ dengan kebutuhan penerima.⁹⁶ Kebijakan yang Sesuai: Beberapa individu menyatakan bahwa kebijakan bantuan PKH pada masa pandemi telah diberikan secara maksimal dan sesuai prosedur yang ada.⁹⁷ Namun, terdapat juga pendapat bahwa pembagian bantuan belum tepat sasaran dan ada perluasan kerja sama dengan pihak terkait seperti RT, RW atau LPMK⁹⁸. Tantangan dan keterbatasan beberapa pendapat menyebutkan adanya keterbatasan dan tantangan dalam implementasi kebijakan bantuan PKH.⁹⁹ Hal ini termasuk kurangnya koordinasi, pembagian yang tidak adil, ketidakcukupan bantuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta pengaruh penurunan perekonomian pada saat pandemi.”¹⁰⁰

Dalam keseluruhan terdapat beberapa pandangan, mengindikasikan bahwa kebijakan sosial PKH telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan selama masa pandemi. Namun, ada juga perluasan kerja sama, peningkatan pengawasan dan pemastian bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran dan mencukupi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi.

D. Tata Kelola Program Keluarga Harapan / PKH pada Era Pandemi

Tata kelola program PKH di masa pandemi telah dievaluasi dalam beberapa penelitian, dan temuan tersebut menunjukkan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar instansi dan lambatnya proses penyaluran bantuan. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program PKH. Pemerintah, melalui

⁹⁴ Pak Sakir – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 14 Mei 2023 pukul 20.18)

⁹⁵ Ibu Sri – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 21.12)

⁹⁶ Pak Iwan – Lurah Simomulyo (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 11.33)

⁹⁷ Pak Isoni – LPMK (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 09.44)

⁹⁸ Pak Akbar – Pendamping PKH (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 13 Juni 2023 pukul 11.06)

⁹⁹ Pak Tofan – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 21.49)

¹⁰⁰ Pak Waluyo – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 21.14)

Kementerian Sosial (Kemensos), telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat program PKH dalam memberikan perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, serta mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Beberapa kebijakan yang mungkin telah diimplementasikan oleh Kemensos antara lain:

1. Peningkatan koordinasi Kemensos dapat melakukan upaya untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas sosial, kantor pos, dan bank, dalam rangka meningkatkan kelancaran proses penyaluran bantuan. Koordinasi yang baik akan membantu mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program PKH.
2. Peningkatan transparansi upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program PKH sangat penting. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang proses penyaluran bantuan dan mekanisme pengaduan, akan membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
3. Pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan program PKH dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul secara lebih cepat, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil. Evaluasi yang baik juga dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat program PKH.

Dalam situasi yang terus berubah selama pandemi, penting untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian dalam pelaksanaan program PKH. Dengan demikian, program ini dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat program PKH sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial dan mengurangi dampak ekonomi negatif yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19..¹⁰¹

¹⁰¹ Delfi Heni Susanti, dkk, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Selain itu, Ombudsman RI merekomendasikan supaya Kementerian Sosial membuat prosedur mitigasi, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran program PKH. Ombudsman menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan program PKH dan merekomendasikan agar diambil langkah-langkah perbaikan Secara keseluruhan, tata kelola program PKH di masa pandemi telah dievaluasi dalam beberapa kajian dan masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dibenahi. Kementerian Sosial telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat program dan mengatasi masalah tersebut, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Ombudsman juga merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki tata kelola program PKH.¹⁰²

Tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) pada era pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo mengacu pada prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa aspek tata kelola yang dilakukan di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dalam pelaksanaan PKH pada masa pandemi antara lain, identifikasi dan seleksi penerima di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan identifikasi dan seleksi penerima PKH berdasarkan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan survei, pengumpulan data dan verifikasi untuk memastikan bahwa keluarga yang berhak menerima bantuan memenuhi syarat yang ditetapkan.¹⁰³

Pendataan dan pemutakhiran data di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan pendataan dan pemutakhiran data penerima PKH secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data penerima, serta untuk memperbaharui informasi mengenai perubahan status atau kondisi keluarga penerima. Koordinasi dengan instansi terkait di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo berkoordinasi

DIMASA PANDEMI, Vol.1, No.2, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS), 2022, hal 38-51

¹⁰² <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-penyelenggaraan-pkh>

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Rony sebagai LPMK

dengan dinas sosial, kantor pos, bank dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan program PKH. Koordinasi ini meliputi proses penyaluran bantuan, pemutakhiran data, dan pelaporan terkait pelaksanaan program.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan PKH kepada penerima. Bantuan tersebut dapat berupa transfer tunai ke rekening penerima, melalui pencairan di kantor pos atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Monitoring dan evaluasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PKH. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan, dengan tepat sasaran, penerima memperoleh manfaat yang sesuai dan program berjalan efektif.¹⁰⁴

Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait program PKH. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan manfaat program secara optimal dan memahami prosedur pelaksanaannya. Pengawasan dan pengaduan yang diterapkan di kedua kelurahan tersebut juga penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan respons yang cepat terhadap permasalahan atau keluhan yang muncul terkait dengan pelaksanaan PKH. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat melaporkan jika ada potensi pelanggaran, kesalahan, atau masalah dalam penyaluran bantuan. Hal ini memastikan bahwa tata kelola yang baik diterapkan dan bantuan disalurkan dengan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penting untuk terus menjaga dan memperbaiki tata kelola dalam pelaksanaan PKH di era pandemi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses pelaksanaan PKH. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa data penerima bantuan, memastikan penyaluran tepat waktu, dan memverifikasi bahwa bantuan sampai kepada penerima yang memenuhi syarat.

¹⁰⁴ Ibid

2. Mengadakan pertemuan rutin antara instansi terkait, staf pelaksana program PKH, dan masyarakat. Pertemuan ini dapat digunakan untuk memperbaiki koordinasi, menyampaikan informasi terkini mengenai program, serta mendengarkan masukan dan keluhan dari masyarakat.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai oleh program PKH. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil.
4. Meningkatkan transparansi informasi terkait program PKH, termasuk prosedur pelaksanaan, kriteria penerimaan, dan mekanisme pengaduan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan brosur, papan pengumuman, atau media sosial sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik dan terus melakukan perbaikan, diharapkan program PKH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga yang membutuhkan di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo.

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan tata kelola program keluarga harapan PKH pada era pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, terlepas dari penjelasan singkat diatas adapun pernyataan lembaga masyarakat dan aparatur desa, kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa individu yang disebutkan, terdapat variasi pendapat tentang tata kelola bantuan PKH pada masa pandemi. Namun, terdapat beberapa poin yang dapat diidentifikasi:¹⁰⁵

“Efektivitas dan kepatutan beberapa individu menyatakan bahwa tata kelola bantuan PKH pada masa pandemi telah berjalan dengan baik, maksimal, dan sesuai prosedur yang ada. Mereka percaya bahwa bantuan telah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada masalah dalam tata kelola tersebut. Masalah ketidaksesuaian sasaran, terdapat juga pendapat yang menyebutkan bahwa masih ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, di mana beberapa masyarakat yang lebih membutuhkan belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Distribusi yang merata, beberapa pendapat

¹⁰⁵ Ibid

menyatakan bahwa bantuan PKH telah tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang terdampak. Pendapat ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan dilakukan dengan tepat waktu dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima. Koordinasi dengan instansi terkait, terdapat beberapa pendapat yang menyoroti pentingnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas tenaga kerja atau lembaga lainnya, untuk mengumpulkan data dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang tidak lagi bekerja atau tidak dapat melakukan pekerjaan.”

Dalam tata kelola bantuan PKH pada masa pandemi, terdapat variasi pendapat di masyarakat mengenai keefektifan, kepatutan, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Beberapa individu memuji keberhasilan dalam tata kelola, sementara yang lain menyoroti adanya ketidaksesuaian dan masalah dalam penyaluran bantuan. Penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan terus menerus terhadap tata kelola bantuan PKH guna memastikan efektivitas, keadilan, dan kepatutan dalam pelaksanaan program. Evaluasi tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, seperti proses pendistribusian, koordinasi antar instansi terkait, transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul.

Dalam melakukan evaluasi, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah, lembaga terkait, masyarakat penerima bantuan, serta kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai perspektif, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan bantuan PKH. Kerjasama yang baik antara dinas sosial, kelurahan, RT/RW, dan lembaga keuangan atau pos yang terlibat dalam pendistribusian akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan. Selama evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tata kelola bantuan PKH dapat semakin efektif, transparan, dan adil. Hal ini akan membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan.

E. Pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi

Penyaluran program PKH di masa pandemi telah dievaluasi dalam beberapa penelitian. Sebuah studi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menemukan bahwa program PKH efektif dalam mengurangikemiskinan di masa pandemi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran program PKH di masa pandemi. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan lambatnya proses distribusi adalah beberapa masalah yang telah diidentifikasi dalam studi. Ombudsman RI telah merekomendasikan supaya Kementerian Sosial membuat prosedur mitigasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ombudsman menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan program PKH dan merekomendasikan supaya diambil langkah-langkah perbaikan. Ringkasnya, penyaluran program PKH di masa pandemi ini telah dievaluasi dalam beberapa kajian dan masih ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi. Kementerian Sosial telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat program dan mengatasi masalah tersebut, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Kurangnya koordinasi antar instansi dan lambatnya proses distribusi menjadi beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Ombudsman Indonesia juga merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan distribusi program PKH.¹⁰⁶

Dalam konteks penyaluran program PKH (Program Keluarga Harapan) di masa pandemi, Ombudsman menemukan maladministrasi dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan. Beberapa kajian telah dilakukan untuk mengevaluasi program tersebut dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang perlu diperbaiki. Kementerian Sosial telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat program PKH dan mengatasi masalah yang ada. Namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dan proses distribusi yang lambat.

¹⁰⁶ Illen La Reartha dkk, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang", hal 3-23

Ombudsman Indonesia merekomendasikan beberapa langkah perbaikan guna meningkatkan distribusi program PKH. Langkah-langkah tersebut mungkin mencakup:

1. Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Sosial, lembaga keuangan, kantor pos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi yang efektif dapat mempercepat proses distribusi dan meminimalkan kesalahan.
2. Mempercepat proses distribusi dengan menggunakan mekanisme yang efisien, seperti transfer tunai langsung ke rekening penerima bantuan. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dalam pendistribusian.
3. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendistribusian PKH. Pemantauan yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.
4. Memperbaiki pelaporan keuangan terkait dengan penyaluran bantuan PKH. Pelaporan yang akurat dan transparan akan membantu dalam pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan penyaluran program PKH dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran antara lain, identifikasi dan verifikasi penerima di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan identifikasi penerima PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan survei, pengumpulan data dan verifikasi

untuk memastikan bahwa keluarga yang berhak menerima bantuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pendataan dan pemutakhiran data di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo secara berkala melakukan pemutakhiran data penerima PKH untuk memastikan keakuratan dan kevalidan informasi. Hal ini dilakukan untuk memperbaharui informasi mengenai perubahan status atau kondisi keluarga penerima. Koordinasi dengan instansi terkait di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo berkoordinasi dengan dinas sosial, kantor pos, bank dan instansi terkait lainnya dalam proses pendistribusian PKH. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat dan efisien kepada penerima.¹⁰⁷

Penyaluran bantuan dengan mekanisme yang tepat di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan, dengan mekanisme yang tepat, seperti transfer tunai ke rekening penerima atau pencairan melalui kantor pos atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Hal ini membantu meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian. Monitoring dan evaluasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian PKH untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima yang tepat sasaran. Hal ini meliputi pemantauan proses pendistribusian, pelaporan keuangan dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.¹⁰⁸

Edukasi dan Sosialisasi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, prosedur dan tujuan dari PKH, sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Kelurahan Tanjungsari dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan lurah

¹⁰⁸ Ibid

Kelurahan Simomulyo berupaya untuk memastikan bahwa pendistribusian Program Keluarga Harapan dilakukan secara tepat sasaran selama masa pandemi. Hal ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga dapat membantu meringankan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.¹⁰⁹

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan pendistribusian program keluarga harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, terlepas dari penjelasan singkat diatas adapun pernyataan dari lembaga masyarakat dan aparat desa sebagai berikut, Dari kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa individu yang disebutkan, terdapat variasi pendapat tentang pendistribusian bantuan PKH pada masa pandemi. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi:

“Kepatuhan dan kesesuaian oleh beberapa individu menyatakan bahwa pendistribusian bantuan PKH pada masa pandemi telah dilakukan sesuai kebutuhan standar minimal dan tidak terdapat kejanggalan yang signifikan. Mereka menekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Kejanggalan dalam pendistribusian, beberapa pendapat mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam pendistribusian bantuan. Salah satunya adalah kasus di mana kartu bantuan PKH darilansia diambil oleh pihak tertentu tanpa pengetahuan lansia tersebut tentang adanya uang di dalam kartu. Selain itu, keterlambatan pendistribusian juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Keterlambatan dan ketepatan waktu, terdapat pandangan yang berbeda mengenai keterlambatan dalam pendistribusian bantuan. Beberapa individu mengungkapkan bahwa pendistribusian bantuan telah tepat waktu dan tidak ada keterlambatan, sementara yang lain mengatakan bahwa terkadang terjadi keterlambatan tanpa penjelasan yang jelas. Kesamaan Pendapat tentang keterlambatan, beberapa pendapat mencatat bahwa terjadi keterlambatan dalam pendistribusian, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti alasan di balik keterlambatan tersebut. Pihak RT hanya memberikan informasi kepada wargajika terjadi keterlambatan, tetapi tidak mengetahui alasan yang mendasarinya. Pendistribusian ganda, salah satu pendapat

¹⁰⁹ Ibid

menyebutkan bahwa pendistribusian bantuan PKH dilakukan dengan memberikan rangkap dua bulan sekali untuk menghindari kerumunan selama PPKM. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dan mencegah penyebaran COVID-19.”

Dalam pendistribusian bantuan PKH pada masa pandemi, terdapat variasi pendapat dari berbagai individu. Beberapa orang menyatakan bahwa pendistribusian berjalan dengan baik dan sesuai, sementara yang lain mencatat kejanggalan, keterlambatan, atau ketidakmerataan dalam proses tersebut. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dan perbedaan dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan PKH di berbagai wilayah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pendistribusian bantuan PKH antara lain:

1. Peningkatan koordinasi, penting untuk memperkuat koordinasi antara semua pihak terkait, termasuk dinas sosial, kelurahan, RT/RW, serta lembaga keuangan atau pos yang terlibat dalam proses pendistribusian. Koordinasi yang baik dapat memastikan alur distribusi yang efektif dan tepat sasaran.
2. Peningkatan komunikasi, komunikasi yang baik antara pihak terkait dan masyarakat penerima bantuan sangat penting. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang proses pendistribusian, syarat penerimaan, dan mekanisme pengaduan akan membantu mengurangi kebingungan atau ketidakpastian.
3. Pemantauan dan evaluasi, pemantauan yang berkelanjutan terhadap proses pendistribusian serta evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dapat memberikan wawasan penting untuk perbaikan. Melalui pemantauan dan evaluasi, masalah dapat diidentifikasi secara lebih cepat, dan langkah-langkah perbaikan dapat diambil.

4. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan proses pendistribusian dapat membangun kepercayaan masyarakat. Pelaporan keuangan yang jelas dan tersedia untuk umum, serta mekanisme pengaduan yang responsif dan terbuka, dapat memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendistribusian bantuan PKH dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Hal ini akan membantu mencapai tujuan yang lebih baik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan selama masa pandemi dan masa-masa sulit lainnya.

Adapun terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan program keluarga harapan akan tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali, walaupun dari segi unsur syarat yang ada seharusnya orang tersebut mendapatkannya, pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu AN¹¹⁰

“ pernyataan dari narasumber bahwa belum pernah mendapatkan bantuan apapun selama ini, padahal sudah terlihat jelas bahwasannya sangat membutuhkan dan sesuai dengan syarat, narasumber sudah pernah melapor kepada RT setempat akan tetapi mendapatkan respon yang tidak sesuai, jadinya pelapor tidak pernah melaporkan keluh kesah atau kritiknya lagi “

Adapun masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan program keluarga harapan akan tetapi mendapatkan bantuan tersebut, pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu JN.¹¹¹

“ pernyataan dari narasumber adalah mendapatkan bantuan ini bukan karena adanya sticker keluarga miskin walaupun mempunyai rumah besar dan memiliki mobil, akan tetapi menurut RT setempat bahwasannya data nama yang pernah masuk di RS ketika pandemi akan mendapatkan bantuan, karena nama tersebut sudah ada langsung di Dinas Sosial, dengan alasan bahwa masih mempunyai anak sekolah dan kepala keluarga yang sedang dirawat di RS “

¹¹⁰ Penulis sengaja membuat anonim sebagai kode etik penelitian

¹¹¹ Penulis sengaja membuat anonim sebagai kode etik penelitian

Dalam teori yang dicantumkan oleh penulis, tata kelola kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya belum baik, hal itu juga dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan aparaturnya dan warga penerima bantuan. Karena pendistribusian bantuan program keluarga harapan di dua wilayah masih belum maksimal dan belum tepat sasaran.

F. Aspek perbandingan Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo

Pada saat pandemi COVID-19, pembagian bantuan PKH di Kelurahan Tanjungsari mengalami keterlambatan akibat dari penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mengharuskan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam situasi seperti ini, pihak terkait dapat memutuskan untuk menggabungkan pendistribusian pada bulan berikutnya, dengan jumlah total bantuan yang tetap sama seperti yang diberikan setiap bulannya. Meskipun pendistribusian dilakukan dengan menggabungkan beberapa bulan, penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tetap disalurkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apabila peraturan mengharuskan pembagian bantuan dilakukan setiap bulan, maka penggabungan pendistribusian dapat dianggap sebagai keterlambatan dalam pelaksanaannya.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan dan peraturan terkait penyaluran bantuan PKH dapat berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada aturan dan kebijakan yang berlaku di Kelurahan Tanjungsari atau petunjuk yang diberikan oleh pihak terkait, seperti Dinas Sosial setempat, untuk memahami bagaimana pendistribusian bantuan PKH dilakukan selama periode PPKM atau situasi darurat lainnya. Upaya untuk tetap melaksanakan pembagian bantuan PKH meskipun dengan penyesuaian dalam situasi pandemi merupakan langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima bantuan. Namun, penting juga untuk terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam proses pendistribusian agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun alokasi jumlah yang diberikan tetap sama, untuk ketidak tepat sasaran di Kelurahan Tanjungsari adanya janda yang tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan meskipun janda tersebut masih mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah, hasil wawancara saya dengan beliau dapat menjelaskan

bahwa beliau sudah memberanikan diri untuk melakukan kritikan kepada RT terkait dan bertanya kenapa tidak mendapatkan bantuan dan beliau mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak dapat menjawab kritikan dan pertanyaannya, dari situlah warga sekitar yang seharusnya membutuhkan bantuan sudah tidak berani untuk sekedar melaporkan atau bertanya.¹¹²

Pendistribusian bantuan PKH di Kelurahan Simomulyo mengalami keterlambatan akibat PPKM dan aturan menjaga jarak yang diterapkan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Keterlambatan ini dapat terjadi karena pengambilan bantuan PKH dilakukan di ruangan tertutup yang memiliki keterbatasan sirkulasi udara. Hal ini merupakan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dari Pemerintah. Meskipun terjadi keterlambatan dalam pendistribusian, jumlah total bantuan yang diberikan tetap sama dengan alokasi yang diberikan setiap bulan. Jika terjadi keterlambatan selama dua bulan, maka pada bulan ketiga akan diberikan alokasi bantuan sebesar tiga kali lipat.

Namun, penting untuk mencatat bahwa ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan yang signifikan terhadap seorang kakek yang hidup sebatang kara dan sangat bergantung pada bantuan tersebut. Meskipun telah dilakukan pelaporan kepada pihak RT setempat dan Kecamatan, bantuan tersebut tidak kunjung diterima oleh kakek tersebut. Sangat disayangkan bahwa bantuan tidak sampai kepada penerima yang seharusnya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk terus melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang setempat, seperti Kecamatan atau Dinas Sosial, untuk memastikan bahwa masalah tersebut diatasi dan bantuan disalurkan kepada penerima yang tepat sasaran.

Selain itu, penting juga untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsifitas dalam penyaluran bantuan PKH. Pelaporan dan pengawasan yang ketat dapat membantu memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkannya dengan tepat. Dalam situasi seperti ini, mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak berwenang secara terus terang dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi

¹¹² Penulis sengaja membuat anonim sebagai kode etik penelitian

ketidaksesuaian dan memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan..¹¹³

Di wilayah tersebut juga adanya seseorang yang memiliki toko dan mobil yang bisa dibilang berkecukupan akan tetapi mendapatkan bantuan tersebut, menurut RT setempat adanya pendataan dari RS yang tidak bisa disebutkan namanya, yang apabila ada seseorang di rawat disana pada saat Covid maka data nama orang tersebut sudah masuk kedalam data nama orang yang membutuhkan dan akan mendapatkan bantuan.

Apabila terdapat kasus di mana seseorang yang sebenarnya memiliki kecukupan mendapatkan bantuan PKH, hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam proses identifikasi dan seleksi penerima bantuan. Situasi yang Anda sebutkan mengenai adanya pendataan dari RS yang mencakup nama orang yang tidak seharusnya menerima bantuan, menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pendataan dan verifikasi penerima PKH. Pendataan yang akurat dan verifikasi yang baik merupakan tahap penting dalam proses penentuan penerima bantuan PKH. Hal ini dimaksudkan agar bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang membutuhkan.

Dalam kasus tersebut, penting untuk melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial untuk mengklarifikasi dan memperbaiki kesalahan pendataan. Proses verifikasi yang lebih cermat dan pemeriksaan ulang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan PKH hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Selain itu, penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program PKH. Pengawasan yang ketat, pelaporan yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat akan membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serupa.

Perbaikan dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pendataan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan tindakan yang tepat, program PKH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial di masa pandemi dan seterusnya.

¹¹³ Wawancara dengan Pak Tofan Ketua RT

Kelebihan penelitian ini adalah dalam penelitian ini, peneliti menemukan kelebihan dan kekurangan yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti berkonsentrasi untuk membahas tata kelola kebijakan sosial, perlindungan sosial dan pendistribusian, sehingga dalam bab 4 membahas rumusan masalah dengan rinci.

Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti kurang mendapatkan informasi yang banyak disebabkan beberapa informan yang sulit untuk ditemui, diajak berkomunikasi atau di wawancara, sementara penelitian sebelumnya mempunyai banyak akses dan mudah untuk berkomunikasi dengan informan.

G. Pasca pandemi

Adanya ketidak tepat sasaran bantuan pada saat pandemi Covid 19 yang banyak sekali orang-orang yang seharusnya mendapatkan akan tetapi tidak mendapatkan, setelah evaluasi ulang oleh Pemerintah dan Dinas Sosial maka saat ini lembaga terkait dan juga pendamping PKH lebih detail dan benar-benar melihat juga mendengar siapapun yang membutuhkan bantuan maka akan langsung diatasi, adanya beberapa warga yang melapor atau mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan langsung di respon baik dan langsung di urus di RT setempat untuk bisa mendaftarkan NIK yang di lanjutkan di Kelurahan lalu oleh Kelurahan pihak pendampingan turun langsung untuk survei di tempat warga yang mengajukan, apabila sesuai syarat maka pendampingan mengajukan kepada Dinas Sosial dan langsung di lakukan survei setiap rumah juga di berikan beberapa pertanyaan untuk di jawab.

Dengan adanya evaluasi ulang dan pendekatan yang lebih terperinci, diharapkan bahwa lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan dapat diakomodasi dan mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Melibatkan lembaga terkait, pendamping PKH, RT, dan Kelurahan dalam proses pendaftaran dan survei merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pendampingan yang terjun langsung ke lapangan untuk survei dan memberikan pertanyaan yang relevan dapat membantudalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Proses survei dan verifikasi di setiap rumah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan benar-benar membutuhkan. Hal ini juga membantu menghindari kesalahan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian bantuan. Penting untuk terus memperbaiki dan memantau proses pendataan, survei, dan verifikasi dalam pelaksanaan PKH. Melakukan evaluasi berkala, menerima laporan dan masukan dari masyarakat, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait akan membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketidaktepatan sasaran bantuan PKH dapat diminimalkan dan bantuan dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menurut peneliti bahwa penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan merata di setiap wilayah sangat penting dalam program PKH. Hal ini memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang faktor-faktor lain seperti koneksi atau kedekatan dengan pihak RT. Melakukan survei langsung dan penilaian dari pihak Dinas Sosial adalah langkah yang baik dalam memastikan bahwa penerima bantuan adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan melakukan proses penilaian yang objektif dan transparan, diharapkan program PKH dapat mencapai tujuannya untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.

Perlu diingat bahwa pelaksanaan program ini memerlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti dinas sosial, kelurahan, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, pemantauan yang efektif dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Semoga langkah-langkah seperti ini terus dilaksanakan untuk memperkuat efektivitas dan transparansi program PKH. Dengan cara tersebut, diharapkan bahwa bantuan dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan, memberikan perlindungan sosial yang lebih luas, dan mengurangi kesenjangan serta ketimpangan dalam masyarakat.

Menurut peneliti penelitian ini sudah memiliki keberhasilan di karenakan sudah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dengan detail pada bab 4 dan mendapatkan beberapa informasi penting yang peneliti sebelumnya tidak mengetahuinya. Keberhasilan dari setiap tindakan perubahan yang telah

dilaksanakan dalam pemberian bantuan yang tepat sasaran di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, melalui proses tercapainya tujuan yang telah ditentukan, pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun, adanya kesesuaian syarat yang dibuat juga tepat sasaran pada setiap orang yang membutuhkan. Pada penelitian ini Kriteria mendapatkan bantuan yaitu lansia, janda, mempunyai anak yang masih sekolah dan yang memiliki pekerjaan tidak tetap, penelitian ini dikatakan berhasil karena adanya peningkatan dari pihak terkait yang mau untuk survei satu-satu rumah yang sudah mengajukan untuk mendapatkan bantuan, karena hal tersebut juga bisa mengatasi ketidak tepat sasaran bantuan.¹¹⁴

H. Penutup

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh lembaga masyarakat dan aparat desa, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait kebijakan sosial, tata kelola program, dan pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjungsari selama masa pandemi. Berikut adalah perbandingan dari pernyataan yang disampaikan. Kebijakan Sosial, menurut Pak Feriyadiwarso menyatakan bahwa kebijakan yang diambil adalah dengan masyarakat yang mengajukan mandiri atas usulan dari RT setempat dan usulan tersebut disampaikan ke kelurahan. Hal ini sesuai dengan prosedur yang ada. Pak UM berpendapat bahwa PKH tetap berjalan, namun dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang tidak menerima bantuan meskipun membutuhkannya. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam kebijakan sosial tersebut.

Tata Kelola Program, menurut Pak Feriyadiwarso dan Pak Sakir menyatakan bahwa tata kelola bantuan PKH pada masa pandemi sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Pak UM berpendapat bahwa masih ada beberapa kejanggalan dalam tata kelola bantuan PKH yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka

¹¹⁴ Penulis sengaja membuat anonim sebagai kode etik penelitian

dapatkan. Pendistribusian Program, menurut Pak Feryadiwarso menyatakan bahwa pendistribusian bantuan PKH pada masa pandemi sudah maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Pak UM mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam pendistribusian bantuan PKH, di mana beberapa masyarakat yang seharusnya membutuhkan tidak mendapatkannya. Dan Pak Sakir menyatakan bahwa pendistribusian bantuan PKH pada masa pandemi sudah dilakukan dengan baik, dan bantuan tersebut sudah diberikan secara merata kepada warga yang pendapatannya di bawah UMK.

Dalam perbandingan tersebut, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait kebijakan sosial, tata kelola program, dan pendistribusian PKH di Kelurahan Tanjungsari selama masa pandemi. Pendapat dari lembaga masyarakat dan aparatur desa mencerminkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap pelaksanaan PKH di wilayah tersebut. Penting untuk terus meningkatkan tata kelola dan pendistribusian program secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan.¹¹⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁵ ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip universalisme menjamin hak-hak sosial bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari pada program penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial.

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan program PKH di masa pandemi, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dapat mengambil beberapa langkah kebijakan sosial. Salah satunya adalah memperbaiki proses identifikasi dan pendaftaran penerima. Dengan bekerja sama dengan dinas sosial setempat, kelurahan dapat memastikan bahwa keluarga miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat PKH terdaftar dengan benar. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, termasuk dinas sosial, kelurahan, dan lembaga keuangan atau pos yang terlibat dalam pendistribusian bantuan. Koordinasi yang baik akan membantu mengatasi kendala lambatnya proses distribusi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Selama masa pandemi, juga perlu diperhatikan aspek keamanan dan kesehatan dalam pelaksanaan program PKH. Hal ini meliputi memastikan protokol kesehatan diikuti saat pendataan, distribusi, dan pendampingan kepada penerima. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19. Dengan melakukan perbaikan dalam proses identifikasi, pendaftaran, koordinasi, dan penerapan protokol kesehatan, diharapkan pelaksanaan program PKH di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dapat lebih efektif

dan tepat sasaran, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada keluarga miskin yang membutuhkan.

Dari kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa individu yang disebutkan, terdapat variasi pendapat tentang tata kelola bantuan PKH pada masa pandemi. Beberapa individu memuji keefektifan dan kepatutan dalam tatakelola, sementara yang lain menyebutkan adanya ketidaksesuaian dan masalah dalam penyaluran bantuan. Penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan terus menerus dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam tata kelola bantuan PKH. Penyaluran program PKH di masa pandemi telah dievaluasi dalam beberapa penelitian. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan lambatnya proses distribusi adalah beberapa masalah yang telah diidentifikasi dalam studi. Ombudsman menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan program PKH dan merekomendasikan agar diambil langkah-langkah perbaikan.

Ringkasnya, penyaluran program PKH di masa pandemi ini telah dievaluasi dalam beberapa kajian, dan masih ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi. Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memperbaharui informasi mengenai perubahan status atau kondisi keluarga penerima. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat dan efisien kepada penerima. Selain itu, keterlambatan pendistribusian juga menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Beberapa individu menyebutkan bahwa pendistribusian telah berjalan dengan baik dan sesuai, sementara yang lain menyoroti kejanggalan, keterlambatan dan ketidakmerataan dalam pendistribusian. Penting untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pendistribusian bantuan PKH agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Adapun masyarakat yang seharusnya tidak menerima

bantuan program keluarga harapan akan tetapi mendapatkan bantuan tersebut, pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu JN. Dalam teori yang dicantumkan oleh penulis, tata kelola kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya belum baik, hal itu juga dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan aparatur dan warga penerima bantuan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran terkait tata kelola kebijakan sosial di era pandemi terkait bantuan program keluarga harapan, pemerintah perlu memastikan bahwa data penerima bantuan sudah akurat dan up-to-date agar proses distribusi berjalan efektif. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam hal pendistribusian bantuan agar tidak ada overlap atau kesalahan dalam pengiriman. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan teknologi seperti e-wallet atau mobile banking untuk memudahkan akses bagi penerima bantuan yang sulit dijangkau secara fisik. Dalam hal ketentuan kebijakan sosial program Keluarga Harapan, perlu dilakukan evaluasi ulang apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini atau perlu diperbarui agar lebih tepat sasaran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hiroko Okada dan Takahiro Kiuchi, 2020, Predictors of Stay Home during COVID-19 Pandemic and Social Locking under Protection, hal 2-11
- C.S.T. Kansil dkk, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta. Jala Permata, 2009), halaman 50
- Ahmad Nawawi, ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KE DEPAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, Vol. 2 No. 10, Oktober 2021, hal 1825
- Georges Adunlin A. Christson A. Adedoyin, dkk, 2020, Using the protection motivation theory to examine the effects of fear arousal on the practice of social distancing during the COVID-19 outbreak in rural areas, hal 168-172
- Shahra Razavi, Christina Behrendt, dkk, 2020, Reinvigorating the social contract and strengthening social cohesion: Social protection responses to COVID-19, Vol. 73, hal 55-80
- Mulyadi Sumarto, 2007, Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan, Volume 10, Nomor 3
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 15
- Soetomo, Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 15, Nomor 1, Juli 2011)
- Harjono, dkk (2010), Analisis empirik tentang kerawanan sosial akibat keterbatasan sumberdaya sosial di Indonesia dipaparkan dengan cermat oleh beberapa peneliti yang kritis.
- Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

- Lesmana Rian Andhika, Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government, Vol. 8, No. 2, hal 93
- Habibullah, PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA, Vol. 3, No. 01, Sosio Informa, hal 2-4
- Nugrahana dan Hadi, Staretegi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, hal 790-791
- Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty, PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
- Habibullah, SOCIAL PROTECTION COMPREHENSIVE IN INDONESIA, Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017
- Muhammad Taufiq Hatta Wibowo¹ dan Ami Afriyani, STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 12, Nomor 1, Januari 2021
- Armando Barrientos & David Hulme, Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution, Vol. 37, No. 4, Desember 2009
- Armando Barrientos & Claudio Santiba, New Forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in Latin America, volume 41, hal 1-26
- A.WAHDANIAH, IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE
- Hamidou Taffa Abdoul-Azize¹ & Rehab El Gamil², 2020, Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic

Muhammad Rizki, DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19, Jurnal Good Governance Volume 17 No. 2, September 2021

Hartini Retnaningsih, Social Protection in Efforts to Fulfill the Rights of Orphans Due to the Covid-19 Pandemic, Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 12, No. 2 Desember 2021

Delfi Heni Susanti, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWO KANGKUNG DIMASA PANDEMI, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.2 Juni 2022

Suharto dan Edi (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.

Hartini Retnaningsih, Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah, Volume 11, No. 2 Desember 2020

Baso Iping, PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL, Volume 1, Issue 2, hal 517-520

Sri Davi Anggraeni; Budi Setiawati; dkk, EVALUASI PELAKSANAAN PRORGAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA KUPANG NUNDIRING KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG, Volume 3 Nomor 2, 2020, hal 630

Raditia Wahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, dkk, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, hal 5-7

Silvia Masiero, 2020, COVID-19: What does it mean for digital social protection?

- Winda Mediana dan Hasim As'ari, Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Volume 3. No. 2, Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 2021, hal 138-139
- Sanipah Faisal, Format-format Penelitian Sosial. Raja Grafindo: Jakarta 1995, Hlm 20.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Aldabeta: Bandung 2009, Hlm 8.
- Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:Kencana, 2007), hal 69.
- S. Nasution. Metodologi research (penelitian ilmiah). Jakarta: Bumi Angkasa 2010, Hlm 113.
- Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:Kencana, 2007), hal 69.
- Khalid Zamri, Ria Ariani, "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kelurahan Koto Tengah Kota Payakumbuh)", Vol. 2 No. 1, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 2022 Hal. 343-353
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhammad Zaini, Asep Nurjaman, "The Implementation of the Family Hope Program (PKH) During the Pandemic in Batu City" hal 159-167
- Sri Endang Rahayu1, Ade Fitriani Harahap, "Analysis of the Impact of the Family Hope Program (PKH) Policy in the Era of the Covid-19 Pandemic in Silangkitang District Labuhan Batu Regency, North Sumatra Province" , Vol. 1 Issue 1, hal 14-21

Ibu Sumiati – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu
05 April 2023 pukul 16.31)

Ibu Parinten – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu
05 April 2023 pukul 16.50)

Ibu Istidamah – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari
Sabtu 06 Mei 2023 pukul 19.02)

Ibu Ngastriya – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari
Jumat 14 Mei 2023 pukul 16.04)

Ibu Min Sugiarti – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari
Jumat 14 Mei 2023 pukul 16.18)

Ibu Indah – Masyarakat Penerima PKH (Wawancara dilakukan pada hari Jumat
14 Mei 2023 pukul 17.51)

Pak Feriyadiwarso – Lurah Tanjungsari (Wawancara dilakukan pada hari Rabu
17 Mei 2023 pukul 15.11)

Pak UM (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.11)

Pak Febry – Pendamping PKH (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 17 Mei
2023 pukul 14.32)

Pak Sakir – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Rabu 14 Mei 2023 pukul
20.18)

Ibu Sri – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul
21.12)

Pak Iwan – Lurah Simomulyo (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 16 Mei
2023 pukul 11.33)

Pak Isoni – LPMK (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul
09.44)

Pak Akbar – Pendamping PKH (Wawancara dilakukan pada hari Selasa 13 Juni 2023 pukul 11.06)

Pak Tofan – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 21.49)

Pak Waluyo – Ketua RT (Wawancara dilakukan pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 21.14)

Delfi Heni Susanti, dkk, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI, Vol.1, No.2, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS), 2022, hal 38-51

Ille La Reartha dkk, “ Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang”, hal 3-23

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Esra Dundar Aravacik, Social Policy and the Welfare State, jurnal Public Economics and Finance, hal 2-21

Raditia Wahyu Supriyanto, dkk, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, hal 14-80

Iskandar, Jusman. Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga

Islamy, M. Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Bambang istianto, Demokratisasi Birokrasi hal 17-26

Rahmi Rosita, Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di INDONESIA, Volume 9 No 2, November 2020

Buku

Almasdi Syahza., Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi, 2021

Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press 2011.

Wawan Mas'udi dan Cornelis Lay, Politik Kesejahteraan Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia, hal 7-84

Website

<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (diakses pada 28 Maret 2023)

[https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-temukan maladministrasi-penyelenggaraan-pkh](https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-penyelenggaraan-pkh)

<https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengenal Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco (diakses tanggal 02 Januari 2023)

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2023)

<https://socialprotection.org/discover/publications/program-keluarga-harapan-pkh-indonesian-conditional-cash-transfer-programme> (diakses pada 18 Mei 2023)

<https://www.liputan6.com/hot/read/5283424/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya> (diakses pada 28 Mei 2023)

<https://kemensos.go.id/en/distribution-of-pkh-until-the-end-of-may-hundreds-percent-achieved>

<https://www.findevgateway.org/slide-deck/2021/03/impact-covid-19-pandemic-program-keluarga-harapan-pkh-beneficiaries-and-program>

<https://ppg.kemdikbud.go.id/news/peran-hubungan-masyarakat-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-instansi-pemerintah>
(diakses pada tanggal 02 juli 2023)

<https://sosial.ntbprov.go.id/penyaluran-pkh-hingga-akhir-mei-telah-100/> (diakses pada tanggal 02 juli 2023)

<https://dinsos.palangkaraya.go.id/istilah-singkatan-yang-lazim-digunakan-dalam-penyelenggaraan-tugas-sosial/> (diakses pada tanggal 02 juli 2023)

<https://indonesiabaik.id/infografis/pkh-hadir-bantu-masyarakat-di-tengah-pandemi>
(diakses pada tanggal 06 Juni 2023)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A